



LKIP 2019

Kota Administrasi Jakarta Pusat

LKIP 2019
Kota Administrasi Jakarta Pusat

katapengantar



Dengan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2019 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Secara umum LKIP merupakan dokumen yang berisi informasi tentang perencanaan dan capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta *secara umum* serta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat *secara khusus*, yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 – 2022 yang diselaraskan dengan dokumen pelaksanaan anggaran pada setiap tahunnya, meliputi pelaksanaan fungsi pelayanan (*services*) pembangunan (*development*) serta pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Government* dan *Clean Government*.

Kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras dan capaian kinerjanya yang berhasil dengan baik, sedangkan atas capaian kinerja yang belum optimal hendaknya kita sempurnakan di masa yang akan datang dengan kerjasama yang lebih baik untuk mengatasi kendala-kendala yang kita hadapi.

Akhir kata, kepada semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*) dalam tersusunnya laporan ini, kami mengharapkan adanya masukan dan umpan balik guna perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat di masa mendatang.

Jakarta, 03 Februari 2020

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,

Bayu Meghantara
NIP. 19720520 199101 1 001

daftar isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. GAMBARAN WILAYAH	3
D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	4
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	10
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS	12
B. RENCANA KERJA 2019	13
C. PERJANJIAN KINERJA 2019	28
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. AKUNTABILITAS CAPAIAN KINERJA	29
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	58
C. PRESTASI	58
BAB 4 PENUTUP	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	59
LAMPIRAN	

ikhtisareksektif

Arah kebijakan dan program pembangunan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tersusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2017-2022 merupakan perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 dengan visi *Jakarta Maju, Lestari dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan Bagi Semua* serta beberapa misi untuk pencapaian visi di atas, yaitu :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan;
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana Aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis dan berintegritas;
4. Menjadikan Jakarta kota lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Untuk merealisasikan amanah Peraturan Daerah tersebut, Kota Administrasi Jakarta Pusat melaksanakan misi *menjadikan Jakarta tempat wahana Aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis dan berintegritas*, dengan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Strategis 2017-2022, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijadikan indikator utama dalam Perjanjian Kinerja, yaitu Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan (*termasuk di Kelurahan*);

Capaian indikator kinerja pada tahun 2019, antara lain :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan (termasuk di Kelurahan) pada program/ kegiatan :	83	83,58	100,7
		a. PPSU			
		b. JUMANTIK			
		c. POSYANDU			
		d. PKK			
		e. RPTRA			
		f. Ketertiban Umum			

babsatu

pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan semangat reformasi penyelenggaraan tata kelola, setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utama yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Terwujudnya suatu *good governance* dalam praktik pemerintahan dan kenegaraan adalah harapan semua pihak. Dalam rangka penyelenggaraan *good governance* dimaksud, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Salah satu esensi dari berbagai peraturan tersebut adalah asas akuntabilitas menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam asas ini terdapat konsekuensi bawa setiap instansi/lembaga pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem AKIP).

Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan wilayah kota yang memiliki posisi strategis sekaligus memiliki tanggung jawab yang besar baik sebagai pendukung Provinsi DKI Jakarta maupun dalam peta nasional dan internasional. Hal ini dikarenakan dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat selain terdapat pusat pemerintahan kota Jakarta, juga terdapat Istana Negara, kantor-kantor Lembaga Tinggi Negara dan kantor-kantor Duta Besar dari berbagai Negara, serta beberapa kawasan bisnis yang menjadi barometer perekonomian di Indonesia, sehingga mempunyai konsekuensi kewenangan maupun kewajiban khusus yang

berbeda dibandingkan kota/kabupaten lainnya baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

Dengan mengemban predikat tersebut, Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai amanat yang harus dilaksanakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat kota-kota besar hampir di seluruh dunia. Upaya menciptakan pemerintahan yang baik tersebut di Indonesia ditandai dengan ditetapkannya TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama.

Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas serta asas akuntabilitas. Disamping itu dinyatakan pula bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban setiap kegiatan harus dilakukan secara benar, jelas, dan teratur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berhasil guna dan berdaya guna. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diinstruksikan kepada seluruh pimpinan instansi untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi dan tujuan organisasi, dan setiap akhir tahun anggaran menyampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat di tahun 2019. Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat selama tahun 2019;
- b. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat di masa yang akan datang;

- c. Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terlaksananya pemerintahan yang baik;
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Jakarta Pusat dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

C. GAMBARAN WILAYAH

Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah salah satu wilayah Administrasi di bawah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, yang secara geografis terletak antara 1060 22' 42" BT sampai dengan 1060 58' 18" BT dan 050 19' 12" LS sampai dengan 060 23' 54" LS, dengan wilayah *sebelah utara* berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat, yaitu Jalan Sunter Raya, Jalan Taman Sari dan Jalan Zainul Arifin. *Sebelah selatan* dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu Jalan Jenderal Sudirman, Kali Banjir Kanal, Kali Ciliwung, dan Jalan Pramuka. *Sebelah barat* dengan Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, yaitu Jalan KS Tubun dan Kali Grogol. Sedangkan *sebelah timur* dengan Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu bypass Jalan Jenderal Achmad Yani.

Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah 48,13 km² dengan ketinggian 4 meter di atas permukaan laut, dan sebagian besar terdiri dari tanah daratan yang relatif landai dengan belahan kontur yang tinggi di sepanjang Kali Banjir Kanal. Secara administrasi pemerintahan, Kota Administrasi Jakarta Pusat dibagi dalam 8 (*delapan*) Kecamatan, 44 (*empat puluh empat*) Kelurahan, 395 (*tiga ratus sembilan puluh lima*) Rukun Warga (RW), dan 4.700 (*empat ribu tujuh ratus*) Rukun Tetangga (RT).

Berdasarkan data penduduk per Desember 2018 yang bersumber dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat berjumlah 1.145.569 jiwa, yang terdiri dari 577.965 laki-laki dan 567.604 perempuan berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), 516 laki-laki dan 372 perempuan berstatus Warga Negara Asing (WNA). Kepala Keluarga (KK) berjumlah 381.267, terdiri atas 289.995 KK laki-laki dan 91.272 KK perempuan, dengan tingkat kepadatan penduduk 23.820 jiwa/km². Berdasarkan kecamatan, tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi terdapat di Kecamatan Kemayoran dengan jumlah 262.635 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang paling rendah ada pada Kecamatan Menteng dengan jumlah 91.897 jiwa. Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat termasuk multi etnis yang terdiri dari hampir semua suku di Indonesia dengan membawa serta agama, adat istiadat, seni budaya, dan kebiasaan masing-masing suku. Sampai saat ini, wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat juga masih menjadi tujuan urbanisasi para penduduk dari berbagai daerah.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Kedudukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, bahwa Kota Administrasi merupakan unsur pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan dan memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi

Kota Administrasi dipimpin oleh Walikota yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Wakil Walikota yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Walikota, dan dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi bahwa Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina Kecamatan dan Kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai fungsi

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi;
- c. penetapan keputusan taktis operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di Wilayah Kota Administrasi;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
- e. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
- f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- h. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kota Administrasi;
- j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- k. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- l. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
- m. pelaksanaan dan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah tingkat Wilayah Kota Administrasi;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
- o. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Kota Administrasi;
- p. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kota Administrasi;
- q. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kota Administrasi; dan
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.

2. Susunan organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat

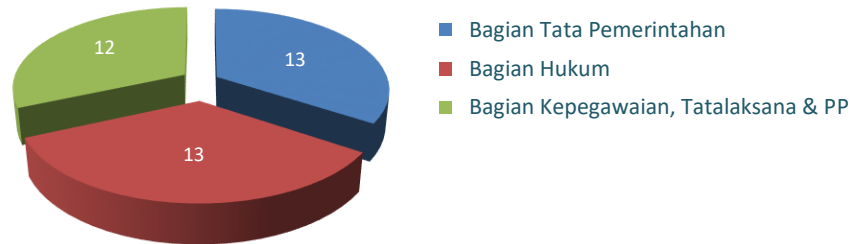
Susunan organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat terdiri dari :

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Sekretariat Kota;
 - 1). Asisten Pemerintahan, terdiri atas :
 - a). Bagian Tata Pemerintahan;
 - b). Bagian Hukum;
 - c). Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik;
mengoordinasikan unit-unit di bidang Pemerintahan:
 - a). Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b). Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c). Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - d). Suku Badan Kepegawaian Kota;
 - e). Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f). Satpol PP Kota Administrasi;
 - g). Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

GRAFIK 1.1

Komposisi Pegawai Setko di bawah Asisten Pemerintahan
Keadaan : Januari 2020

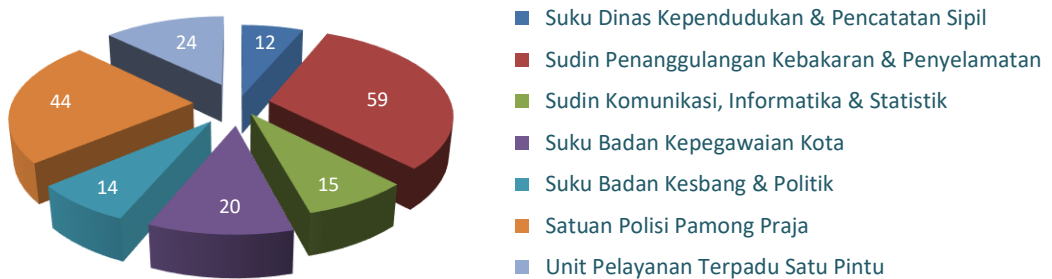
ASISTEN PEMERINTAHAN



GRAFIK 1.2

Komposisi Pegawai Unit-unit
Di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan
Keadaan : Januari 2020

Unit Koordinasi



Sumber Data

*Bagian Kepegawaian, Tatalaksana & Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat*

- 2). Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
 - a). Bagian Perekonomian;
 - b). Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;

mengoordinasikan unit-unit di bidang Perekonomian :

- a). Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan;
- b). Suku Dinas Perindustrian dan Energi;
- c). Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
- d). Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- e). Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- f). Suku Dinas Perhubungan.

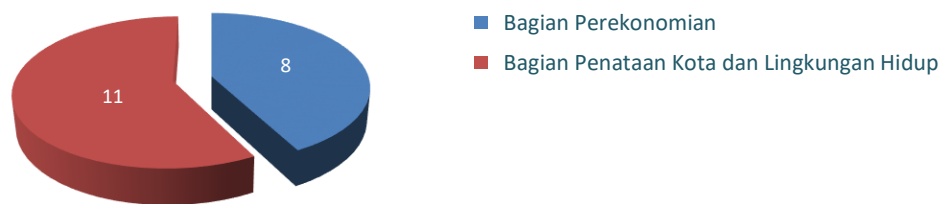
mengoordinasikan unit-unit di bidang Pembangunan :

- a). Suku Dinas Bina Marga;
- b). Suku Dinas Sumber Daya Air;
- c). Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d). Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- e). Suku Dinas Kehutanan; dan
- f). Suku Dinas Lingkungan Hidup.

GRAFIK 1.3

Komposisi Pegawai Setko
di bawah Koordinasi Asisten Perekonomian & Pembangunan
Keadaan : Januari 2020

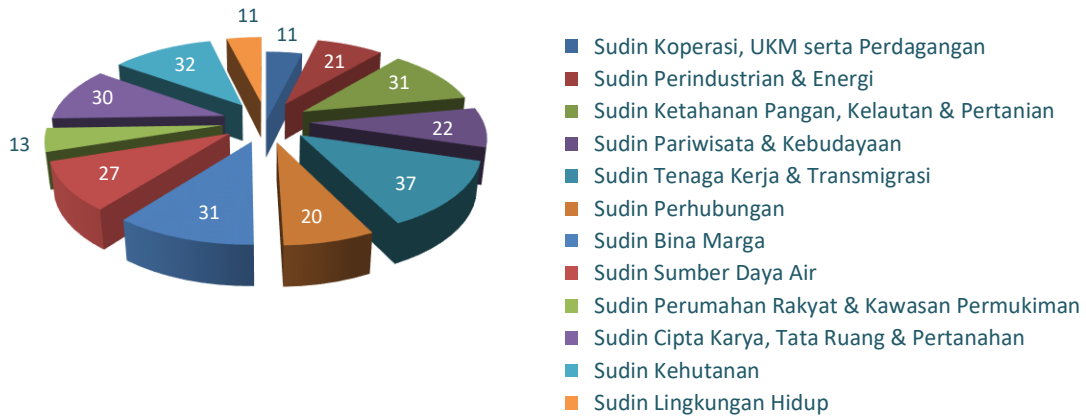
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN



GRAFIK 1.4

Komposisi Pegawai Unit-unit
Di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Keadaan : Januari 2020

Unit Koordinasi



Sumber Data

*Bagian Kepegawaian, Tatalaksana & Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat*

3). Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

- a). Bagian Umum dan Protokol;
- b). Bagian Keuangan;
- c). Bagian Kesejahteraan Rakyat.

mengoordinasikan unit-unit di bidang Administrasi dan Kesra :

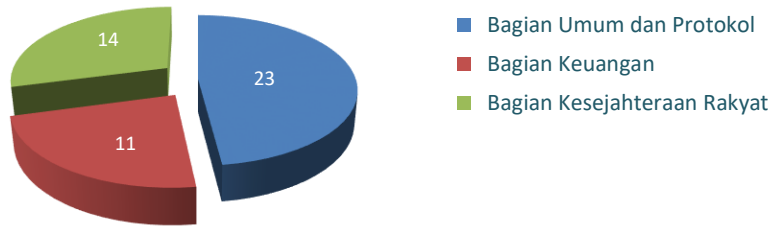
- a). Suku Dinas Sosial;
- b). Suku Dinas Pendidikan I dan II;
- c). Suku Dinas Kesehatan;
- d). Suku Dinas Pemuda dan Olahraga;
- e). Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk;
- f). Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip.

GRAFIK 1.5

Komposisi Pegawai di bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Kadaan : Januari 2020

ASISTEN ADMINISTRASI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



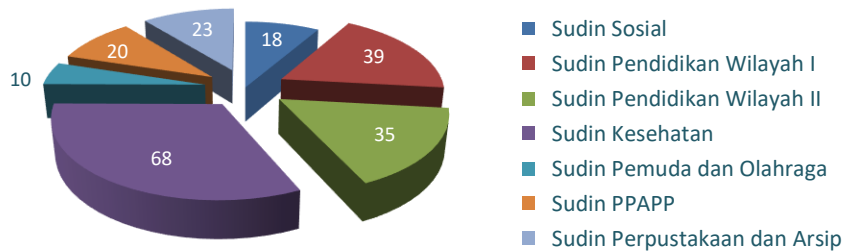
GRAFIK 1.6

Komposisi Pegawai Unit-unit

Di bawah koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Kadaan : Januari 2019

Unit Koordinasi



Sumber Data

*Bagian Kepegawaian, Tatalaksana & Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat*

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2019, terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

a. BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, gambaran singkat tentang kedudukan/ gambaran wilayah, tugas pokok dan fungsi organisasi dan personil perangkat daerah serta sistematika penyusunan

b. BAB II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan tentang Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022, Rencana Kerja Tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2019 Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang didasari pada dokumen perencanaan.

c. BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan realisasi fisik dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2019. Diuraikan pula analisa capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019, rencana kerja tahun 2019 yang ditetapkan dengan perjanjian kinerja berdasarkan rencana strategis wilayah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017-2022;

d. BAB IV : Penutup

Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat di masa yang akan datang.

Lampiran

babdua

perencanaankinerja

Dalam rangka merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Visi : ***Jakarta Maju, Lestari dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan Bagi Semua.***

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur akan melakukan 5 (lima) misi pembangunan daerah, antara lain :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan;
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana Aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis dan berintegritas;
4. Menjadikan Jakarta kota lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, selanjutnya menjadi pedoman Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam menyusun tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022, agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Pusat 2017-2022 sinkron dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2017-2022

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kota Administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, "Kota Administrasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Wilayah Kota Administrasi" (Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 pasal 2 ayat 1). Maka, Kota Administrasi Jakarta Pusat mengemban misi nomor 3, yaitu ***Menjadikan Jakarta tempat wahana Aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis dan berintegritas***, sebagai bentuk dukungan terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam merealisasikan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, Kota Administrasi Jakarta Pusat menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Pusat 2017-2022, yang secara bertahap akan direalisasikan pada setiap tahun, yaitu ***Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua***.

Ada perbedaan target dalam RPJMD dan turunannya di Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pada RPJMD target Indeks Kepuasan Masyarakat dalam jangka waktu 5 tahun menggunakan nilai konversi IKM yaitu 80, 83, 86, 88, dan 88,5; sementara pada Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat target dimulai dari tahun kedua dan menggunakan indeks skala 4: tidak ada target, 3,3,4, dan 4 di tahun kelima.

TABEL 2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk menciptakan Jakarta sebagai Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	- (80)	3 (83)	3 (86)	4 (88)	4 (88,5)

B. RENCANA KERJA TAHUN 2019

Tahun 2019 sebagai periode kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 menargetkan 1 (satu) indikator penilaian untuk sasaran strategis di tahun 2019. Adapun indikator tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen penilaian antara lain :

INDIKATOR 1

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

TINGKAT KOTA

A. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

No.	SASARAN STRATEGIS/ KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ KINERJA	Target	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat	> 83	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Pusat Inspeksi mendadak terhadap pengelolaan penanganan sarana prasarana umum (PPSU) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2019; Koordinasi Persiapan Verifikasi Lapangan atas lomba-lomba PKK tingkat Provinsi Kelembagaan Monitoring Distribusi Pangan Bersubsidi di RPTRA Persiapan Peresmian RPTRA Monitoring Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Rapat Koordinasi Penguatan Kinerja Kader JUMANTIK Bimbingan Teknis Penggunaan aplikasi e-TIK Sinkronisasi Pokjnal POSYANDU 	<p>Terlaksananya Koordinasi pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Pusat</p> <p>Terlaksananya pemantauan penanganan sarana prasarana umum (PPSU) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat</p> <p>Terlaksananya koordinasi persiapan verifikasi lapangan atas lomba PKK tingkat provinsi</p> <p>1. Tersusunnya draft Keputusan Walikota tentang Susunan Pengurus TP PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>1. Termonitornya Program Pangan Bersubsidi diperuntukkan bagi para pemegang KJP, PPSU, PHL dan Pemegang KJL</p> <p>1. Terlaksananya koordinasi kegiatan RPTRA</p> <p>1. Terpantaunya Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan PSN</p> <p>1. Terlaksananya Koordinasi Penguatan Kinerja Kader JUMANTIK</p> <p>1. Terlaksananya bimbingan teknis penggunaan Sistem Pencatatan, Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Sarang Nyamuk berbasis web</p> <p>1. Terlaksananya sinkronisasi untuk Penguatan Pokjnal POSYANDU</p>	<p>laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Draft SK</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>	-	

B. Rencana Aksi (RENAKSI) Pencapaian Kinerja

No.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB RENCANA AKSI	INSTANSI TERKAIT RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN RENCANA AKSI	UKURAN KEBERHASILAN RENCANA AKSI	Target/ Output	% Capaian Target Output	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta 2. Satpol Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat; 3. Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Adm. Jakarta Pusat; 4. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat; 5. Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat 6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat 7. TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat 8. Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat 9. Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan Kegiatan; 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan. 	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Pusat >=83	Laporan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100%	
2.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di kelurahan) pada program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Ketentraman dan Ketertiban Umum;	Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Suku Dinas Lingkungan Hidup 3. Suku Dinas Bina Marga 4. Suku Dinas Sumber Daya Air 5. Suku Dinas Kehutanan 6. Bagian Hukum 7. Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik 8. Bagian Tata Pemerintahan 9. Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan Kegiatan; 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan. 	1. Persentase tindak lanjut penyelesaian Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU);	Laporan hasil pemantauan	100%	

No.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB RENCANA AKSI	INSTANSI TERKAIT RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN RENCANA AKSI	UKURAN KEBERHASILAN RENCANA AKSI	Target/ Output	% Capaian Target Output	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Lapangan atas lomba-lomba PKK tingkat Provinsi	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat	1. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat 3. PKK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan Kegiatan; 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	1. Terlaksananya koordinasi persiapan verifikasi lapangan atas lomba PKK tingkat provinsi	Laporan	100%	
4.	Kelembagaan		1. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat 3. PKK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan Kegiatan; 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	1. Tersusunnya draft Keputusan Walikota tentang Susunan Pengurus TP PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan	Laporan	100%	
5.	Monitoring Distribusi Pangan Bersubsidi di RPTRA		1. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat 3. PKK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat 4. PKK Tingkat Kecamatan 5. PKK Tingkat Kelurahan 6. Kelurahan terkait	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan Kegiatan; 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	1. Terselenggaranya Program Pangan Bersubsidi diperuntukkan bagi para pemegang KJP, PPSU, PHL dan Pemegang KLJ	Laporan	100%	
6.	Persiapan Peresmian RPTRA		1. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat 3. PKK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat 4. PKK Tingkat Kecamatan 5. PKK Tingkat Kelurahan 6. Kelurahan terkait	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan Kegiatan; 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	1. Terkoordinasinya persiapan peresmian RPTRA yang siap digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat.	Laporan	100%	
7.	Monitoring Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)		1. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan Kegiatan; 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	1. Terpantaunya Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan PSN	Laporan	100%	

No.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB RENCANA AKSI	INSTANSI TERKAIT RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN RENCANA AKSI	UKURAN KEBERHASILAN RENCANA AKSI	Target/ Output	% Capaian Target Output	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Rapat Koordinasi Penguatan Kinerja Kader JUMANTIK		3 Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat 1 Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan Kegiatan; 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	1. Terlaksananya Koordinasi Penguatan Kinerja Kader JUMANTIK	Laporan	100%	
			2 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat					
			3 Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat					
9.	Bimbingan Teknis Penggunaan aplikasi e-TIK		1 Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan Kegiatan; 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	1. Terlaksananya bimbingan teknis penggunaan Sistem Pencatatan, Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Sarang Nyamuk berbasis web	Laporan	100%	
			2 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat					
			3 Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat					
10	Sinkronisasi Pokjnal Posyandu		1 Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan Kegiatan; 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	1. Terlaksananya sinkronisasi untuk Penguatan Pokjnal POSYANDU	Laporan	100%	
			2 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat					
			3 Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat					

C. Rencana Aksi (RENAKSI)

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019	Target Kinerja Tahun 2019	KEGIATAN	JADWAL (per-bulan)												Output/Keluaran	PROGRAM	KEGIATAN	Dana (Rp.)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Koordinasi Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Pusat	> =83	1. Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dengan Biro ORB													Laporan Hasil Rapat		Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	-
				2. Penyusunan Instrumen dan penentuan jumlah responden Survei Kepuasan Masyarakat													Kuesioner dan jumlah responden Survei			

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019	Target Kinerja Tahun 2019	KEGIATAN	JADWAL (per-bulan)												Output/Keluaran	PROGRAM	KEGIATAN	Dana (Rp.)				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
2				3. Koordinasi Teknis Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dengan Kecamatan dan Kelurahan																				
				4. Pelaksanaan Survei / Pengumpulan Data di Kecamatan dan Kelurahan																	kuesioner yang telah terisi			
				5. Pengolahan dan penyajian Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																		capaian IKM dan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan		
				6. Analisa dan penyajian Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Tingkat Kota																		capaian IKM dan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat di tingkat Kota		
				7. Penyampaian ke Tingkat Provinsi																		Laporan Survei Kepuasan Masyarakat di tingkat Kota		
				1. Koordinasi Persiapan																		Poin-poin persiapan kegiatan		Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan) pada program Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum;
				2. Koordinasi Teknis Pelaksanaan																		Hasil Koordinasi Teknis Pelaksanaan		
3				3. Pelaksanaan															Pelaksanaan kegiatan					
				4. Pelaporan																Laporan				
				1. Koordinasi Persiapan																	Persiapan Kegiatan		Inspeksi mendadak terhadap pengelolaan penanganan sarana prasarana umum (PPSU) Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2019;	
				2. Koordinasi Teknis Pelaksanaan																	Hasil Koordinasi Teknis Pelaksanaan			
4				3. Pelaksanaan															Pelaksanaan Kegiatan					
				4. Pelaporan																Laporan				
				1. Koordinasi																	Usulan pengurus		Kelembagaan	
				2. Penyusunan draft																	Draft SK Walikota			
5				1. Koordinasi persiapan															Poin-poin persiapan kegiatan		Onitoring Distribusi Pangan Bersubsidi di RPTRA			
				2. Koordinasi Teknis Pelaksanaan																Hasil Koordinasi Teknis Pelaksanaan				
				3. Pelaksanaan																	Pelaksanaan kegiatan			
				4. Pelaporan																	Laporan			
6				1. Koordinasi persiapan															Poin-poin persiapan kegiatan		Persiapan peresmian RPTRA			
				2. Koordinasi Teknis Pelaksanaan																Hasil Koordinasi Teknis Pelaksanaan				
				3. Pelaksanaan																	Pelaksanaan kegiatan			
				4. Pelaporan																	Laporan			
7				1. Koordinasi persiapan															Poin-poin persiapan kegiatan		Monitoring Kegiatan PSN			
				2. Koordinasi Teknis Pelaksanaan																Hasil Koordinasi Teknis Pelaksanaan				
				3. Pelaksanaan																	Pelaksanaan kegiatan			
				4. Pelaporan																	Laporan			

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019	Target Kinerja Tahun 2019	KEGIATAN	JADWAL (per-bulan)												Output/Keluaran	PROGRAM	KEGIATAN	Dana (Rp.)		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
8		Terlaksananya koordinasi penguatan kinerja kader JUMANTIK	Laporan	1 Koordinasi persiapan													Poin-poin persiapan kegiatan		Koordinasi Penguatan Kinerja Kader JUMANTIK			
				2 Koordinasi Teknis Pelaksanaan														Hasil Koordinasi Teknis Pelaksanaan				
				3 Pelaksanaan															Pelaksanaan kegiatan			
				4 Pelaporan															Laporan			
9		Terlaksananya bimbingan teknis penggunaan sistem pencatatan, monitoring dan evaluasi pemberantasan sarang nyamuk berbasis web	Laporan	1 Koordinasi persiapan													Poin-poin persiapan kegiatan		Bimbingan Teknis penggunaan aplikasi E-TIK			
				2 Koordinasi Teknis Pelaksanaan														Hasil koordinasi teknis pelaksanaan				
				3 Pelaksanaan															Pelaksanaan kegiatan			
				4 Pelaporan															Laporan			
10		Terlaksananya sinkronisasi untuk penguatan Pokjantal POSYANDU	Laporan	1 Koordinasi persiapan													Poin-poin persiapan kegiatan		Sinkronisasi Pokjantal Posyandu			
				2 Koordinasi teknis pelaksanaan														Hasil koordinasi teknis pelaksanaan				
				3 Pelaksanaan															Pelaksanaan kegiatan			
				4 Pelaporan															Laporan			

TINGKAT KECAMATAN

A. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

No.	SASARAN STRATEGIS/ KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ KINERJA	Target	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat	> 83	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pelaksanaan Rekapitulasi hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tingkat Kelurahan di wilayah Kecamatan;	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	> 83	-	
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pendeteksian dini permasalahan wilayah	85%		
					Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu	Terlaksananya kegiatan Pemlu Pilpres dan Pileg di seluruh TPS Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	100%		

No.	SASARAN STRATEGIS/ KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ KINERJA	Target	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Peningkatan Pengembangan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pengawasan pelanggaran ketertarikan dan ketertiban umum	100%		
					Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan - Gelar kreatifitas forum anak - Pertin PKK - Aneka lomba di RPTRA - Peningkatan SDM pengurus PKK - Pengajian PKK - Kegiatan 10 program pokok PKK	Terselenggaranya kegiatan 10 program pokok PKK	100%		

B. Rencana Aksi (RENAKSI) Pencapaian Kinerja

No.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB RENCANA AKSI	INSTANSI TERKAIT RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN RENCANA AKSI	UKURAN KEBERHASILAN RENCANA AKSI	Target/ Output	% Capaian Target Output	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1. Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat 2. Muspika; 3. DMI dan MUI; 4. Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat; 5. PKK Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat 6. LMK 7. FKDM 8. Karang Taruna	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan Kegiatan; 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	Agregat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Kelurahan	Laporan hasil agregat pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100%	
2.	Koordinasi dengan Muspika dan FKDM;	Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Kasie Pemerintahan)	1. Kecamatan 2. Muspika 3. FKDM	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan Kegiatan; 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	Terlaksananya koordinasi dengan Muspika dan FKDM	Laporan	100%	

No.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB RENCANA AKSI	INSTANSI TERKAIT RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN RENCANA AKSI	UKURAN KEBERHASILAN RENCANA AKSI	Target/ Output	% Capaian Target Output	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Koordinasi bersama Muspika dan lintas sektor terkait di lingkungan Kecamatan	Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Kasie Pemerintahan) Kecamatan	1. Kecamatan	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan Kegiatan; 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	1. Terlaksananya kegiatan Pemilu aman dan damai di Kecamatan Senen	Laporan	100%		
			2. Kelurahan		2. Terlaksananya koordinasi dalam rangka pengawasan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Laporan	100%		
			3. Muspika						
			4. Pol PP						
			5. FKDM						
4	Monitoring dan evaluasi kegiatan PKK di tingkat Kelurahan seKecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Kasie Kesra)	1. Kecamatan	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan Kegiatan; 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	Terlaksananya 10 program pokok PKK	Laporan	100%		
			2. Kelurahan						
			3. TPKK Kecamatan						
			4. TPKK Kelurahan						
			5. Kader penunjang kegiatan PKK						

C. Rencana Aksi (RENAKSI)

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019	Target Kinerja Tahun 2019	KEGIATAN	JADWAL (per-bulan)												Output/Keluaran	PROGRAM	KEGIATAN	Dana (Rp.)				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	>=83	1. Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dengan Bagian KТПP Setko Administrasi Jakarta Pusat														Notulen Rapat		Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	-			
				2. Koordinasi teknis pelaksanaan Survei kepuasan masyarakat dengan Muspika, MUI, DMI, PKK, Karang Taruna, FKDM dan Lurah																Notulen Rapat				
				3. Koordinasi Teknis Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dengan Kecamatan dan Kelurahan																	Data hasil survei			
				4. Pelaksanaan Survei / Pengumpulan Data di Kecamatan																	Laporan hasil survei			
				5. Pengolahan dan penyajian Laporan agregat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Tingkat Kecamatan																	Laporan hasil survei			

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019	Target Kinerja Tahun 2019	KEGIATAN	JADWAL (per-bulan)												Output/Keluaran	PROGRAM	KEGIATAN	Dana (Rp.)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				1																	
		2. Terlaksananya pendeteksian permasalahan wilayah dini	85%	1	Persiapan pelaksanaan dan penyusunan KAK dan HPS	■											KAK dan HPS		Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan		
				2	Penyusunan rencana kerja FKDM Tahun 2019	■															
				3	Pembuatan jadwal dan pembagian daerah kerja bagi anggota FKDM Kecamatan	■															
				4	Rapat Koordinasi internal		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Notulen rapat			
				5	Rapat koordinasi dengan 3 pilar serta sektor terkait			■		■							■	Notulen rapat			
				6	Laporan kegiatan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Laporan bulanan kegiatan FKDM			
		3. Terlaksananya kegiatan Pemilu Pilpres dan Pileg di seluruh TPS Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Laporan	1	Persiapan pelaksanaan dan penyusunan KAK dan HPS														Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu		
				2	Pembuatan jadwal piket Posko	■											KAK dan HPS				
				3	Rapat Koordinasi bersama Muspika dan lintas sektor terkait	■											Jadwal piket posko				
				4	Penyusunan jadwal piket dan monitoring wilayah		■	■	■								Notulen rapat				
				5	Pelaksanaan Pemilu			■									Jadwal piket monitoring				
				6	Laporan Kegiatan				■								Hasil pemilihan dan dokumentasi kegiatan pemilu				
																	Laporan hasil kegiatan				
		4. Terlaksananya pengawasan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Laporan	1	Persiapan pelaksanaan dan penyusunan KAK dan HPS	■											KAK dan HPS		Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan		
				2	Penyusunan jadwal rencana penertiban	■											Jadwal penertiban				
				3	Koordinasi bersama Muspika dan lintas sektor terkait	■			■			■					Notulen rapat				
				4	Kegiatan penertiban (pra dan pasca)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Dokumentasi kegiatan			
				5	Laporan kegiatan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Laporan hasil kegiatan			
		5. Terselenggaranya kegiatan 10 program pokok PKK	Laporan	1	Persiapan pelaksanaan dan penyusunan KAK dan HPS	■											KAK dan HPS		Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan		
				2	Rapat koordinasi dengan kelurahan dan TPKK Kecamatan serta Kelurahan	■											Notulen rapat				
				3	Penyusunan jadwal rencana kegiatan	■											Jadwal rencana kegiatan				
				4	Gelar kreatifitas forum anak						■						Laporan hasil kegiatan				
				5	Pertin PKK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Laporan pelaksanaan dan dokumentasi			
				6	Lomba di RPTRA	■											Laporan pelaksanaan				
				7	Peningkatan SDM pengurus PKK			■				■					Laporan kegiatan				
				8	Pengajian PKK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Laporan kegiatan			
				9	Kegiatan 10 program pokok PKK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Laporan kegiatan			
				10	Laporan kegiatan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Laporan kegiatan bulanan			

TINGKAT KELURAHAN

A. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

No.	SASARAN STRATEGIS/ KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN/ KINERJA	Target	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat	> 83	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kota Administrasi Jakarta Pusat;	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	> 83	-	
					2. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Terlaksananya pendeteksian dini permasalahan wilayah	Laporan		
					3. Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu	Terlaksananya kegiatan Pemlu Pilpres dan Pileg di seluruh TPS Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Laporan		
					4. Peningkatan Peran kelembagaan RT, RW, dan LMK tingkat kelurahan	Terselenggaranya peran kelembagaan RT, RW, dan LMK tingkat Kelurahan	Laporan		
				Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	5. Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya pengawasan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Laporan		
					6. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terselenggaranya kegiatan 10 program pokok PKK	Laporan		
					7. Pengelolaan Ruang Interaksi Warga di kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terselenggaranya operasional RPTRA Kelurahan	Laporan		
					8. Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terselenggaranya kegiatan Posyandu Kelurahan	Laporan		
					9. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terselenggaranya pengawasan jentik di wilayah kelurahan	Laporan		
					10. Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terselenggaranya operasional PPSU Kelurahan	Laporan		

B. Rencana Aksi (RENAKSI) Pencapaian Kinerja

No.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB RENCANA AKSI	INSTANSI TERKAIT RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN RENCANA AKSI	UKURAN KEBERHASILAN RENCANA AKSI	Target/ Output	% Capaian Target Output	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1. Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat 2. Muspika; 3. DMI dan MUI; 4. PKK Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat; 5. LMK 6. FKDM 7. Karang Taruna 8. Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan Kegiatan; 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Pusat >=83	Laporan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kelurahan	100%	
2	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1. Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat 2. Satpol PP 2. LMK 3. FKDM 4. Karang Taruna	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan Kegiatan; 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	Terlaksananya pendeteksian dini permasalahan di wilayah Kelurahan	Laporan	100%	
3	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu	Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1. Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat 3. Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat 4. Satpol PP 5. LMK 6. FKDM 7. Karang Taruna	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan Kegiatan; 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	Terlaksananya kegiatan Pemilu Pilpres dan Pileg di seluruh TPS Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Laporan	100%	
4	Peningkatan Peran kelembagaan RT, RW, dan LMK tingkat kelurahan	Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1. RT 2. RW 3. LMK	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	Terselenggaranya peran kelembagaan RT, RW, dan LMK tingkat Kelurahan	Laporan	100%	

No.	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB RENCANA AKSI	INSTANSI TERKAIT RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN RENCANA AKSI	UKURAN KEBERHASILAN RENCANA AKSI	Target/ Output	% Capaian Target Output	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4 Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat					
5	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Satpol PP	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	Terlaksananya pengawasan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Laporan	100%	
			2 FKDM					
			3 LMK					
			4 Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat					
6	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kelurahan Kota Adm. JP	Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 TPKK Kelurahan dan Kecamatan	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	Terselenggaranya kegiatan 10 program PKK	Laporan	100%	
			2 Sudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat					
7	Pengelolaan Ruang Interaksi Warga di kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 TPKK Kelurahan dan Kecamatan	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	Terselenggaranya operasional RPTRA Kelurahan	Laporan	100%	
			2 Sudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat					
8	Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Sudin Kesehatan Kota Adm JP	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	Terselenggaranya kegiatan Posyandu Kelurahan	Laporan	100%	
			2 PKK Kelurahan					
9	Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Sudin Kesehatan Kota Adm JP	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	Terselenggaranya pengawasan jentik di wilayah kelurahan	Laporan	100%	
			2 Kader Jumantik					
10	Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Bagian Tata Pemerintahan Setko Adm. JP	1. Perencanaan Kegiatan; 2. Pelaksanaan kegiatan 3. Dokumentasi; dan 4. Laporan Kegiatan.	Terselenggaranya operasional PPSU Kelurahan	Laporan	100%	
			2 Suku Dinas Kehutanan Kota Adm JP					
			3 Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm JP					
			4 Suku Dinas Bina Marga Kota Adm JP					
			5 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adm JP					

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019	Target Kinerja Tahun 2019	KEGIATAN	JADWAL (per-bulan)												Output/Keluaran	PROGRAM	KEGIATAN	Dana (Rp.)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3	Penyusunan jadwal rencana kegiatan	■											Jadwal rencana kegiatan			
				4	Gelar kreatifitas forum anak					■							Laporan hasil kegiatan			
				5	Pertin PKK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Laporan pelaksanaan dan dokumentasi			
				6	Lomba di RPTRA							■					Laporan pelaksanaan			
				7	Peningkatan SDM pengurus PKK			■				■					Laporan kegiatan			
				8	Pengajian PKK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Laporan kegiatan			
				9	Kegiatan 10 program pokok PKK	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Laporan kegiatan			
				10	Laporan kegiatan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Laporan kegiatan bulanan			
		6	Terselenggaranya operasional RPTRA Kelurahan	Laporan	1	Persiapan pelaksanaan dan penyusunan KAK dan HPS	■										KAK dan HPS		Pengelolaan Ruang Interaksi Warga di Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	
					2	Penyusunan jadwal rencana kegiatan	■										Jadwal rencana kegiatan			
					3	Pelayanan RPTRA - PAUD - Posyandu - Perpustakaan Anak - Tempat olahraga dan bermain anak - Kegiatan kreatif anak - Kegiatan PKK termasuk lomba-lomba - Olahraga - Kegiatan kesenian - Tempat penampungan sementara bencana	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Dokumentasi, catatan pengurus RPTRA			
					4	Laporan kegiatan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Laporan kegiatan bulanan			
		7	Terselenggaranya kegiatan Posyandu kelurahan	Laporan	1	Persiapan pelaksanaan dan penyusunan KAK dan HPS	■										KAK dan HPS		Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Administrasi Jakarta Pusat	
					2	Penyusunan jadwal rencana kegiatan	■										Jadwal rencana kegiatan			
					3	Pelayanan Posyandu - Posyandu ibu hamil menyusui, balita - Posyandu Lansia - Pelayanan kesehatan umum (KB, imunisasi, oralit, dst)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Catatan petugas Posyandu			
					4	Laporan kegiatan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Laporan kegiatan bulanan			
		8	Terselenggaranya pengawasan jentik di wilayah Kelurahan	Laporan	1	Persiapan pelaksanaan dan penyusunan KAK dan HPS	■												Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya melalui pengarahannya Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di Kota Administrasi Jakarta Pusat	
					2	Penyusunan jadwal rencana kegiatan	■													
					3	Pelaksanaan kegiatan Jumantik	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Catatan hasil kegiatan dari petugas Jumantik			
					4	Laporan kegiatan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Laporan kegiatan bulanan			
		9	Terselenggaranya operasional PPSU Kelurahan	PPSU	1	Persiapan pelaksanaan dan penyusunan KAK dan HPS	■										KAK dan HPS		Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	
					2	Penyusunan jadwal rencana kegiatan	■										Jadwal rencana kegiatan			
					3	Pelaksanaan penanganan prasarana sarana Umum di wilayah Kelurahan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Dokumentasi, laporan kepala regu			
					4	Laporan kegiatan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Laporan kegiatan bulanan			

C. PERJANJIAN KINERJA 2019

Berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Pusat 2017-2022, telah dipilih 1 program kerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai indikator utama yang bersinergi dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Untuk mendukung sinergi antara program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dengan penerapan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat telah menetapkan indikator kinerja pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Pusat 2017-2022, sebagai indikator kinerja utama.

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	83

No	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1.	Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat	23.922.160.005	APBD
2.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor	25.347.030.519	APBD
3.	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional	184.314.600	APBD

babtiga

akuntabilitaskinerja

A. AKUNTABILITAS CAPAIAN KINERJA

Untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam peningkatan layanan kemasyarakatan di wilayah dapat dilihat dari capaian atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang sesuai dengan target RPJMD 2018-2022 dan terukur dalam nilai realisasi dari target indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai Indikator Kinerja Utama.

Sesuai visi dan misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang tertuang pada RPJMD 2018-2022, telah ditetapkan untuk Walikota dan Bupati Administrasi 1 sasaran strategis yang akan dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja utama. Sasaran Strategis tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi yang memiliki indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (termasuk di Kelurahan).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik pada tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolak ukur bagi instansi pemerintah dalam melakukan evaluasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar tetap prima. Hampir semua instansi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, menjadikan IKM sangat penting untuk mendorong perubahan pelayanan menjadi lebih baik lagi.

Survei Kepuasan Masyarakat, selain dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan, juga memungkinkan untuk dilakukan perbaikan pelayanan, dan menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Target Indikator Kinerja Utama yang tertera dalam Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk tahun 2019 adalah indeks 3 atau nilai konversi 83.

TABEL 3.1
TARGET TAHUN 2019 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
1	2	3	4
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	83 (indeks 3)

Metode yang dapat digunakan dalam mengukur sejauh mana capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi angka indeks perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tahun 2019, akan dapat dilihat dari seberapa besar rasio nilai indeks antara realisasi dengan target yang terdapat pada indikator sasaran yang telah ditetapkan.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Administrasi Jakarta Pusat menggunakan survei dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang kemudian dimodifikasi untuk mengakomodir 6 (enam) komponen yang diukur sebagai Perjanjian Kinerja Walikota. Enam komponen tersebut adalah Pelayanan Jumantik, Pelayanan RPTRA/Taman Maju Bersama, Pelayanan PKK, Pelayanan Posyandu, Pelayanan PPSU, dan Pelayanan Ketertiban Umum (Trantib).

Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menurut definisi operasional pada Sistem Informasi Perencanaan Jangan Menengah Provinsi DKI Jakarta adalah Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kegiatan PPSU, Jumantik, Posyandu, PKK, RPTRA, Ketertiban Umum untuk Kelurahan, Agregat Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan, dan Agregat Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan untuk Kota dan Kabupaten. Definisi tersebut menunjukkan adanya hubungan koordinasi dari kelurahan sampai ke kota. Hasil kegiatan kelurahan, dan koordinasi pemantauan yang dilaksanakan Kecamatan dan Kota akan memengaruhi ketiga lapis pemerintahan tersebut.

Pengukuran kepuasan kelurahan dilaksanakan dengan koordinasi dan bimbingan teknis dari kota dan tahapannya adalah sebagai berikut :

a. Tahapan pengukuran

1). Persiapan

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan tupoksi diampu Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik (KTPP), berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta untuk memodifikasi pertanyaan survei yang didapat dari Permenpan Nomor 14 Tahun 2017. Setelah penetapan instrumen yang digunakan, dan jumlah responden ditentukan bersama Biro (100 responden per kelurahan per komponen), ditetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 54 Tahun 2019 tentang Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2019. Setelah itu dilaksanakan koordinasi teknis dengan Kecamatan dan Kelurahan tentang isi kuesioner, responden, cara penilaian, serta bentuk pelaporan. Persiapan sampai ke tahap ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2019.

2). Pelaksanaan Survei

Pelaksanaan survei oleh Kelurahan dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2019. Kuesioner dalam bentuk kertas dan survei dilaksanakan secara langsung antara petugas dengan responden. Isi kuesioner antara lain:

a). Identitas Responden

Data ini digunakan untuk proses dan pengelompokan responden, yang meliputi : jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan terakhir responden.

b). Pendapat Responden

Merupakan pendapat masyarakat yang meliputi kepuasan dan keinginan atas 9 (sembilan) unsur pelayanan publik, dimana unsur pelayanan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang terdiri dari :

- Persyaratan;
- Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
- Waktu Penyelesaian;
- Biaya/Tarif;

- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
- Kompetensi Pelaksana;
- Perilaku Pelaksana;
- Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan; serta
- Sarana dan Prasarana.

Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan melalui beberapa tahapan, antara lain :

a). Pemantauan

Pemantauan adalah proses mengamati dan mencatat secara langsung di lokasi penilaian yang ada kaitannya dengan objek yang dinilai, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

b). Pengumpulan Data

Dalam upaya untuk memperoleh informasi tentang kondisi Kota Administrasi Jakarta Pusat baik struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta informasi lainnya. Data ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui pemantauan dan kuesioner dengan meminta data kepada pihak-pihak yang terkait, baik berupa arsip maupun dokumen.

c). Pengisian Kuesioner

3). Pengolahan Data

Pengolahan data hasil kuesioner oleh Kelurahan dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 yang kemudian diserahkan ke Kecamatan untuk diolah guna mendapatkan agregat Kecamatan dan diserahkan ke Kota. Kota menganalisa dan menyajikan hasil survei dalam bentuk laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Pusat yang kemudian diserahkan ke Provinsi pada bulan September 2019.

a). Penginputan hasil pengisian kuesioner

Data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan data untuk mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai IKM diperoleh dari nilai rata-rata tertimbang masing-masing 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu :

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur
- 3) Waktu penyelesaian
- 4) Biaya/tarif

- 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan
- 6) Kompetensi pelaksana
- 7) Perilaku pelaksana
- 8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- 9) Sarana dan prasarana

b). Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus :

$$\text{Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Selanjutnya, untuk memperoleh nilai IKM, dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Berdasarkan petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan memperhitungkan total nilai persepsi untuk setiap unsur pelayanan, total nilai persepsi diperoleh dengan mengalikan frekuensi responden yang memberikan jawaban untuk setiap skala penilaian. Misalnya untuk dimensi kinerja, nilai 1 diberikan untuk penilaian Sangat Tidak Setuju (STS), nilai 2 Tidak Setuju (T), nilai 3 (Setuju) dan nilai 4 (Sangat Setuju). Selanjutnya jawaban dikonversikan dengan nilai dasar 25 digunakan untuk memperoleh selang penilaian antara 25 – 100, sehingga diperoleh nilai IKM. Nilai IKM tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori A (Sangat Baik), B (Baik), C (Kurang Baik) dan D (Tidak Baik), sebagaimana disajikan dengan tabel berikut :

TABEL 3.2
KONVERSI NILAI PERSEPSI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	2	3	4	5
1	1.00 – 2.59	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 – 3.06	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	3.07 – 3.53	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.54 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Rumus umum dalam pengambilan ukuran sampel menurut Krejcie dan Morgan ini sebagai berikut :

$$S = \left\{ \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q} \right\}$$

dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lamda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%,5%, 10%

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0.5

d = 0.05

c). Penentuan Nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Pusat

Untuk menentukan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Pusat, dihitung dengan memperhitungkan total nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat seluruh Kecamatan dibagi jumlah Kecamatan, maka IKM Kota Administrasi Jakarta Pusat ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Kota Administrasi Jakarta Pusat} = \frac{\text{Total IKM Kecamatan}}{\text{Jumlah Kecamatan}}$$

d). Jenis Pelayanan dan Jumlah Responden

Penyusunan laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan kompilasi data dari 6 (enam) jenis layanan dengan rincian jumlah responden sebagai berikut :

- Pelayanan PPSU berjumlah 4.400 responden;
- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban berjumlah 4.400 responden;
- Pelayanan POSYANDU berjumlah 4.400 responden;
- Pelayanan JUMANTIK berjumlah 4.400 responden;
- Pelayanan PKK berjumlah 4.400 responden;
- Pelayanan RPTRA berjumlah 2.900 responden;

Total jumlah responden sebanyak *24.900 responden*

A. CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil survei, ditemukan beberapa poin sebagai berikut:

1. Identitas/Karakteristik Responden

Survei dilakukan melalui penilaian atas komponen Pelayanan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Pelayanan Trantib, Pelayanan POSYANDU, Pelayanan JUMANTIK, Pelayanan PKK dan Pelayanan RPTRA, dengan karakteristik responden yaitu jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan terakhir.

a). Pelayanan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)

A		Jenis kelamin		Orang	Persentase
	Laki-Laki			2.280	52%
	Perempuan			2.119	48%
B		Pekerjaan		Orang	Persentase
	PNS			109	2%
	TNI			63	1%
	POLRI			56	1%
	Swasta			1.598	36%
	Wirasaha			1.003	23%
	Lainnya			1.574	37%

C	Pendidikan Terakhir	Orang	Persentase
	SD	296	7%
	SMP	894	20%
	SMA	2.229	51%
	D3	433	10%
	S1	292	7%
	S2	30	1%
	Lainnya	167	4%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pengguna layanan PPSU sebagian besar adalah *berjenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta dengan pendidikan terakhir SMA*.

b). Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban (Trantib)

A	Jenis kelamin	Orang	Persentase
	Laki-Laki	2.217	50%
	Perempuan	2.210	50%
B	Pekerjaan	Orang	Persentase
	PNS	133	3%
	TNI	37	1%
	POLRI	332	8%
	Swasta	1.631	37%
	Wirausaha	959	21%
	Lainnya	1.311	30%
C	Pendidikan Terakhir	Orang	Persentase
	SD	250	6%
	SMP	642	15%
	SMA	2.325	53%
	D3	502	11%
	S1	423	10%
	S2	31	1%
	Lainnya	157	5%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pengguna layanan PPSU sebagian besar adalah *berjenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta dengan pendidikan terakhir SMA*.

c). Pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)

A	Jenis kelamin	Orang	Persentase
	Laki-Laki	1.245	28%
	Perempuan	3.154	72%
B	Pekerjaan	Orang	Persentase
	PNS	85	2%

	TNI	33	1%
	POLRI	68	2%
	Swasta	1.156	26%
	Wirasaha	885	20%
	Lainnya	2.165	49%
C Pendidikan Terakhir			
		Orang	Persentase
	SD	368	8%
	SMP	848	19%
	SMA	2.182	50%
	D3	467	11%
	S1	246	6%
	S2	32	1%
	Lainnya	152	5%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pengguna layanan PPSU sebagian besar adalah *berjenis kelamin perempuan, pekerjaan lainnya dengan pendidikan terakhir SMA*.

d). Pelayananan Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK)

A Jenis kelamin			
		Orang	Persentase
	Laki-Laki	1.252	28%
	Perempuan	3.147	72%
B Pekerjaan			
		Orang	Persentase
	PNS	48	1%
	TNI	33	1%
	POLRI	71	2%
	Swasta	1.055	24%
	Wirasaha	902	21%
	Lainnya	2.281	52%
C Pendidikan Terakhir			
		Orang	Persentase
	SD	492	11%
	SMP	865	20%
	SMA	2.222	51%
	D3	382	9%
	S1	267	6%
	S2	28	1%
	Lainnya	0	0

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pengguna layanan PPSU sebagian besar adalah *berjenis kelamin perempuan, pekerjaan lainnya dengan pendidikan terakhir SMA*.

e). Pelayananan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

A Jenis kelamin		Orang	Persentase
Laki-Laki		1.115	25%
Perempuan		3.309	75%
B Pekerjaan		Orang	Persentase
PNS		36	1%
TNI		16	0.36%
POLRI		73	2%
Swasta		1.453	33%
Wirausaha		1.041	24%
Lainnya		1.706	39%
C Pendidikan Terakhir		Orang	Persentase
SD		269	6%
SMP		916	21%
SMA		2.436	55%
D3		379	9%
S1		230	5%
S2		13	0.2%
Lainnya		129	3%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pengguna layanan PPSU sebagian besar adalah *berjenis kelamin perempuan, pekerjaan lainnya dengan pendidikan terakhir SMA*.

f). Pelayananan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA)

A Jenis kelamin		Orang	Persentase
Laki-Laki		1.091	38%
Perempuan		1.808	62%
B Pekerjaan		Orang	Persentase
PNS		53	2%
TNI		11	0.3%
POLRI		63	2%
Swasta		969	33%
Wirausaha		552	19%
Lainnya		1.250	43%
C Pendidikan Terakhir		Orang	Persentase
SD		198	7%
SMP		563	19%
SMA		1.626	56%
D3		276	10%
S1		190	7%

S2	0	0
Lainnya	33	1%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pengguna layanan PPSU sebagian besar adalah *berjenis kelamin perempuan, pekerjaan lainnya dengan pendidikan terakhir SMA*.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah 83,58 dari Target 83 atau 3 dari target 3 menurut satuan indeks skala 1-4.

TABEL 3.3

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2019
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	83 (indeks 3)	83.58 (indeks 3)	100.7%

3. Perbandingan antara hasil yang dicapai pada tahun 2019 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

TABEL 3.4

PERBANDINGAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) MENGGUNAKAN NILAI KONVERSI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2018 DAN 2019

TAHUN	2018	2019
1	2	3
TARGET NILAI IKM	80	83
CAPAIAN NILAI IKM	82.26	83.58

Target nilai indikator Kinerja IKM Tahun 2018 adalah sebesar 80, terealisasi sebesar 82.26, sehingga capaian kinerjanya 102.83%. Sementara untuk tahun 2019 target nilai indikator kinerja IKM sebesar 83, dengan nilai realisasi sebesar 83.58, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100.7%. Meskipun Indeks Kepuasan Masyarakatnya di tahun 2019 tercapai 100.7%, atau adanya peningkatan ketercapaian, namun dihitung dari target per tahunnya, mengalami penurunan 2%.

4. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Pusat

Berdasarkan target yang telah disusun di RPJMD Provinsi DKI Jakarta dan Dokumen Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka perbandingannya adalah sebagai berikut

TABEL 3.5

**PERBANDINGAN TARGET KINERJA SASARAN PADA RPJMD DAN RENSTRA
DENGAN REALISASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2018 DAN 2019**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk menciptakan Jakarta sebagai Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)	- (80)	3 (83)	3 (86)	4 (88)	4 (88,5)
2.	REALISASI IKM			82,26	83,58			

5. Perbandingan dengan Standar Nasional

Dari enam komponen yang diukur untuk kepuasan masyarakat, beberapa komponen memiliki kekhususan dan belum ditemui di provinsi/kota/kabupaten lain (contoh: PPSU, RPTRA), selain itu pelayanan yang diukur merupakan pelayanan tanpa persyatan dan biaya (berbeda dengan pelayanan yang dituju dalam Permenpan), sehingga hasil survei belum bisa dibandingkan dengan standar nasional.

Analisa Faktor Pendukung Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat

Jenis Pelayanan

Dari hasil survei didapat capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tahun 2019 sebesar 83,58 dari target 83. Dengan capaian di atas 100% tentunya capaian ini dapat dikatakan berhasil dilaksanakan dengan baik.

Akan tetapi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi tahun 2019 mengalami penurunan sampai 2%. Untuk menelusuri faktor-faktor yang mungkin menghambat perbaikan capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Pusat, diperlukan pemahaman mengenai jenis pelayanan yang diberikan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat sekitar.

1. Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK)

Sebagai kota berpenduduk padat dan heterogen, kesadaran masyarakat akan kebutuhan kesehatan lingkungan dipandang belum terbentuk secara spontan dan mandiri. Sebagai usaha memutus mata rantai kehidupan atau siklus nyamuk dengan pengendalian vector secara kimia dan pengelolaan lingkungan.

Langkah pengelolaan lingkungan termurah dan termudah adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yang dapat dilakukan dengan 3M plus. Untuk kelancaran PSN dibentuklah petugas Juru Pemantau Jentik (Jumantik) yang disahkan melalui Surat Keputusan Lurah. Petugas Jumantik ditetapkan dengan surat tugas Lurah, 1 orang per RT. Petugas diganti bila diperlukan.

Pelaksanaan kegiatan PSN berupa pemeriksaan jentik, sosialisasi dan pengarahan kepada warga di kelurahan dan dilaksanakan secara rutin dilaksanakan setiap hari Jumat dari rumah ke rumah oleh petugas Jumantik RT dengan petugas Jumantik RW sebagai coordinator dan pengawas yang merekap hasil laporan petugas Jumantik RT. Pelaksanaan PSN dibantu paramedis dari Puskesmas Kelurahan dan tenaga kesehatan terlatih setempat. Untuk tahun 2019, anggaran seluruh kelurahan untuk Jumantik sebesar Rp. 34.868.357.413 dengan realisasi Rp. 31.463.749.636 atau 90,23% penyerapan. Anggaran digunakan untuk Jumantik kit, honor per bulan, dan bonus (syarat ketentuan berlaku).

2. Petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU)

PPSU dibentuk pada tahun 2015 untuk membantu warga dan kelurahan dalam menjaga sarana prasarana umum yang telah disediakan. Jumlah PPSU setiap kelurahan berbeda tergantung dari luas dan kepadatan wilayah tersebut.

Pada awalnya masing-masing kelurahan diminta untuk mengirimkan jumlah PPSU yang diperlukan wilayahnya beserta pertimbangan dan alasannya ke Biro Tata Pemerintahan. Setelah itu, setiap tahun Biro Tata Pemerintahan memberi wilayah kesempatan untuk menambah jumlah petugas bila disertai pertimbangan dan alasan yang dapat diterima.

Petugas PPSU di Kelurahan dievaluasi kinerjanya secara kontinu dan menjadi pertimbangan untuk dikontrak kembali atau tidak di tahun anggaran berikutnya. Kontrak untuk petugas PPSU dibuat dari akhir tahun sebelumnya dan berlaku selama satu tahun.

Jam kerja PPSU adalah delapan jam dengan pembagian tiga waktu kerja (shift) dalam 24 jam. Jadwal kegiatan biasanya berlaku selama satu bulan dan kemudian diatur kembali untuk mencegah kejenuhan.

Pada tahun 2019, anggaran seluruh kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk PPSU sebesar Rp. 174.417.307.544 dengan realisasi Rp. 168.953.914.666 atau 96,87% penyerapan. Anggaran digunakan untuk pengadaan alat kebersihan, atribut (topi, sepatu, baju, sepatu boot, jas hujan, dan seterusnya) serta kelengkapan lain dalam operasional PPSU seperti bahan bakar untuk KDO Hilux dan Gerobak Motor (Germor).

Pekerjaan PPSU meliputi :

- a. Perbaikan jalan berlubang di wilayah kelurahan;
- b. Perbaikan dan pengecatan kanstin, perbaikan pembatas jalan yang rusak di wilayah kelurahan;
- c. Perbaikan trotoar jalan yang rusak dan/atau berlubang di wilayah kelurahan;
- d. Perbaikan saluran rusak di jalan lingkungan/lokal;
- e. Pengurasan saluran, tali-tali dan mulut-mulut air yang mampet di jalan lingkungan/lokal;
- f. Pelaporan segera pembangunan atau aktifitas yang berpotensi mengganggu saluran termasuk penutupan saluran air dan tali-tali air/mulut air;
- g. Penanganan pohon tumbang dan/atau patah di wilayah kelurahan;
- h. Pemangkasan ranting pohon yang menutupi rambu lalu lintas, lampu jalan dan yang membahayakan keselamatan di wilayah Kelurahan;
- i. Pembabatan rumput dan semak liar di wilayah Kelurahan;
- j. Pengambilan pot-pot rusak yang mengganggu lingkungan;
- k. Pelaporan segera penebangan pohon pelindung tanpa izin;
- l. Pembersihan timbunan sampah liar dan cecceran sampah di wilayah Kelurahan;
- m. Pembersihan coretan-coretan dan keping informasi di ruang publik wilayah Kelurahan
- n. Pembersihan jalan, saluran, taman, jalur hijau, area pantai, bangunan dan/atau ruang publik lainnya di wilayah kelurahan;
- o. Penanganan penerangan jalan umum yang rusak dan/atau membahayakan keselamatan;
- p. Penanganan sementara lampu jalan lokal yang rusak/mati dengan menggunakan lampu jalan sementara untuk menerangi jalan sesuai dengan kebutuhan;
- q. Penanganan dan pelaporan jaringan utilitas yang mengganggu kepentingan umum di jalan lingkungan/lokal; dan
- r. Pelaporan lampu penerangan jalan yang dibutuhkan warga dan yang tidak berfungsi.

3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Dalam operasionalnya posyandu menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat dengan bimbingan dari petugas kesehatan, lintas sector dan lembaga terkait.

Di setiap tingkat wilayah Posyandu memiliki kelompok kerja. Untuk tingkat Kota dan Kecamatan disebut Kelompok Kerja Operasional Posyandu (Pokjanal Posyandu) dan Kelompok kerja Posyandu (Pokja Posyandu) untuk tingkat kelurahan.

Di tingkat kelurahan kegiatan Posyandu yang dilaksanakan adalah:

a. Posyandu Balita

Layanan kesehatan dasar untuk ibu dan bayi. Dilaksanakan sebulan sekali dengan bantuan kader setempat. Layanan kesehatan meliputi imunisasi, pemberian vitamin A dosis tinggi, pembagian pil KB atau kondom, pengobatan ringan, dan konsultasi KB

b. Posyandu Lansia

Layanan kesehatan non diskriminatif menyediakan HomeCare dan Puskesmas Kelurahan dibantu kader kesehatan setempat. Dilaksanakan sebulan sekali, meliputi: pemeriksaan tensi darah, gula darah, asam urat, kolesterol, penimbangan berat badan, pemberian makanan sehat, penyuluhan, dan hiburan

Setiap tahun diadakan kegiatan untuk sinkronisasi pengetahuan dan berbagi informasi antar Pokjanal Posyandu yang diprakarsai oleh Sudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pada kegiatan sinkronisasi materi seperti kebijakan mekanisme Pokjanal, manajemen kelembagaan, sampai masalah stunting dan angka kematian dibagi oleh narasumber dari Kementerian. Pada Tahun 2019 Sinkornisasi diadakan di bulan Maret dan Oktober 2019.

Petugas di Posyandu ditetapkan dengan Surat Tugas Lurah dan diganti bila diperlukan. Petugas diambil 1 orang per RW.

Untuk tahun 2019, anggaran dari APBD yang digunakan seluruh Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk Posyandu sebesar Rp. 16.810.538.314 dengan realisasi Rp. 15.398.699.896 atau 91,60% penyerapan. Anggaran digunakan untuk honor petugas Posyandu, operasional, PMT balita dan lansia, seragam, dan alat kesehatan.

4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK atau Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan organisasi yang melibatkan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama karena keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan dalam mendukung program-program pemerintah.

Tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat ada mulai dari tingkat kota sampai dengan kelurahan. Secara fungsional, tim penggerak diketuai oleh istri Pimpinan Daerah (Walikota, Camat, Lurah).

Tim Penggerak PKK, yang beranggotakan para relawan terdiri dari tokoh masyarakat, istri kepala dinas/jawatan dan kepala daerah sampai tingkat kelurahan, bergerak sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana dan penggerak. Pembinaan teknis dilaksanakan dengan bekerja dengan unsur Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat atau dinas terkait lainnya.

Dalam upaya menjangkau sebanyak mungkin keluarga, dilaksanakan dengan melalui Kelompok Dasawisma, yaitu kelompok 10 hingga 20 KK yang berdekatan. Ketua kelompok yang dipilih oleh anggota membina 10 rumah dan bertugas menyuluh, menggerakkan dan mencatat kondisi keluarga yang ada dalam kelompoknya, seperti ibu hamil, menyusui, balita, orang sakit, buta huruf, dan sebagainya. Informasi ini disampaikan ke kelompok PKK di atasnya, yang sampai di Tim Penggerak PKK Kelurahan.

Data yang dikumpulkan melalui Kelompok PKK masuk dalam CARIK, palikasi pendataan warga, sumber penyediaan informasi penting dari tengah masyarakat secara cepat dan akurat.

Untuk tahun 2019, anggaran seluruh kelurahan untuk PKK sebesar Rp. 8.537.115.449 dengan realisasi Rp. 7.684.838.429 atau 90,02% penyerapan. Anggaran digunakan antara lain untuk lomba PKK, pengajian, dan arisan.

5. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak/ Taman Maju Bersama (RPTRA/TMB)

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau Taman Maju Bersama, untuk seterusnya disingkat menjadi RPTRA/TMB, adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program pokok PKK untuk diintegrasikan dengan program Kota Layak Anak. RPTRA/TMB diutamakan untuk menjadi tempat interaksi warga dan sarana relaksasi untuk perbaikan mental anak-anak dan keluarga pengguna sarana.

Layanan-layanan yang diberikan pemerintah kota administrasi, antara lain :

a. Layanan anak, yang terdiri dari :

- 1). Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD);
- 2). Posyandu;
- 3). Perpustakaan anak;
- 4). Tempat berolahraga;
- 5). Tempat bermain;
- 6). Kegiatan kreatif anak.

b. Layanan masyarakat, yang terdiri dari :

- 1). Kegiatan 10 program pokok PKK
- 2). PKK-Mart
- 3). Kegiatan masyarakat yang tidak berpotensi merusak taman dan/atau sarana prasarana yang ada
- 4). Olahraga
- 5). Kegiatan kesenian

c. Layanan kebencanaan, tempat pengungsian sementara saat banjir, kebakaran dan bencana lainnya

Pembangunan RPTRA selain dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dilaksanakan swasta sebagai bentuk CSR. Penyediaan sarana dan prasarana RPTRA/TMB Kota Administrasi Jakarta Pusat berkoordinasi dengan Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Sampai tahun 2019 telah didirikan dan difungsikan sebanyak 50 RPTRA/Taman Maju Bersama di 31 Kelurahan.

TABEL 3.6
RPTRA/TMB EKSISTING DI WILAYAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2019

No	Nama RPTRA	Kelurahan	Kecamatan
1	2	3	4
1	Matahari	Cempaka Putih Timur	Cempaka Putih
2	Kampung Benda		
3	Beringin		
4	Anggrek		
5	Mardani Asri	Cempaka Putih Barat	
6	Rawasari Ceria	Rawasari	
7	Mutiara Sumur Batu	Sumur Batu	Kemayoran
8	Harapan Mulia	Harapan Mulya	
9	Serdang Baru	Serdang	
10	Krida Serdang		
11	Bandar Kemayoran	Kemayoran	
12	Kampung Budaya	Utari Panjang	
13	Melati 04	Bendungan Hilir	Tanah Abang
14	Guntur		
15	Taman Raining		
16	Rusben II		
17	Kuungan		
18	Intiland Teduh	Karet Tengsin	
19	Segas Segar Berseri		
20	BONTI	Kebon Melati	
21	Hati Suci	Kampung Bali	
22	H. Hasbi		
23	Rusun Petamburan	Petamburan	
24	Amir Hamzah	Pegangsaan	Menteng
25	Borobudur		
26	Kebon Sirih	Kebon Sirih	
27	Gondangdia	Gondangdia	
28	Tanah Abang 3	Petojo Selatan	Gambir
29	Kejora	Petojo Utara	
30	Flamboyan Kejora		
31	Kenanga	Cideng	
32	Mustika		
33	Melati Duri Pulo	Duri Pulo	
34	Pintu Air	Pasar Baru	Sawah Besar
35	Jaya Molek		
36	Karang Anyar	Karang Anyar	
37	Madusela	Mangga Dua Selatan	
38	Sahara	Gunung Sahari Utara	
39	Rustanti	Tanah Tinggi	Johar Baru
40	Pulo Gundul		
41	Pandawa		
42	Rawa Indah	Kampung Rawa	
43	Rasela Indah		
44	Gempar Gemilang		
45	Komando Ceria	Galur	

No	Nama RPTRA	Kelurahan	Kecamatan
1	2	3	4
46	Gempar Gemilang		
47	Johar Berseri	Johar Baru	Senen
48	Planet Senen	Senen	
49	An Nur	Paseban	
50	Husni Thamrin	Kenari	

Kegiatan-kegiatan utama yang dilaksanakan di RPTRA/TMB antara lain :

- a. Gelar Kreativitas Tingkat Kecamatan dan Kota tahun 2019, dilaksanakan untuk menilai peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola dalam mengimplementasikan 10 program pokok PKK serta keprofesionalan dan keoptimalan dalam melaksanakan tugas mengelola RPTRA/TMB. Target lomba adalah masyarakat, kader PKK, dan pengelola RPTRA/TMB. (anggaran Sudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat
Jenis lomba bervariasi mulai dari lomba untuk anak-anak (lego, mewarnai, futsal, tari tradisional, cerdas cermat), lomba untuk pengelola (Kinerja RPTRA), sampai lomba untuk masyarakat umum (Senam Lansia).
- b. kegiatan Pembinaan untuk Pengelola RPTRA se-Jakarta Pusat (anggaran Sudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat)

Untuk tahun 2019, anggaran seluruh kelurahan untuk RPTRA sebesar Rp. 19.150.599.472 dengan realisasi Rp. 16.905.790.600 atau 88,28% penyerapan. Anggaran digunakan antara lain untuk atk, alat kebersihan, alat listrik, pemeliharaan gedung dan sarana prasarana RPTRA.

6. Ketertiban Umum (Tibum)

Pelaksanaan pelayanan Ketertiban Umum Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan mengikuti Pergub Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

Kegiatan penertiban yang dilaksanakan antara lain :

- a. penertiban bangunan liar dan bangunan yang menyalahi peraturan
- b. Penertiban PKL di sepanjang trotoar
- c. Penertiban PMKS
- d. Piket posko siaga bencana
- e. Pertemuan mediasi untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di wilayah

- f. Melakukan koordinasi dengan Bimaspol, Babinsa dan tokoh masyarakat perihal permasalahan yang ada di wilayah

Selain itu secara berjenjang dilakukan musyawarah tingkat Kelurahan dengan mengundang Camat dan jajarannya serta Babinsa, Babinkamtibmas, LMK, tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh pemuda yang dilakukan pada setiap triwulan untuk koordinasi keamanan dan ketertiban di wilayah.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Seksi Pemerintahan dan Trantib dengan Satpol PP tingkat Kelurahan.

Kegiatan Penertiban dibagi menjadi dua, yaitu pra penertiban dan pasca penertiban. Pra penertiban adalah kegiatan sebelum penertiban dengan mengadakan rapat yang mengundang semua pihak terkait, sedangkan pasca penertiban adalah kegiatan setelah penertiban dengan penjagaan di tempat/ obyek penertiban melibatkan petugas Satpol PP Kelurahan/Babinsa/ dan Babinkamtibmas Kelurahan. Jadwal pelaksanaan pra dan pasca masing-masing satu kali setiap bulan.

Anggaran Penyelenggaraan Ketertiban Umum tingkat Kelurahan digunakan antara lain untuk honorarium TNI/Polri yang menunjang pelaksanaan pengamanan penertiban, makan minum rapat (pra penertiban) dan penjagaan (pasca penertiban). Di Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tahun 2019 menggunakan anggaran sebesar Rp. 153.663.976.556 dengan realisasi sebesar Rp. 150.247.224.499 atau penyerapan sebesar 97,77%

Penyelenggaraan Ketertiban Umum tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tahun 2019 menggunakan anggaran sebesar Rp. 4.443.039.584 dan realisasi sebesar Rp. 4.207.854.100 Penyerapan 94,92%

ANALISA HASIL SURVEI

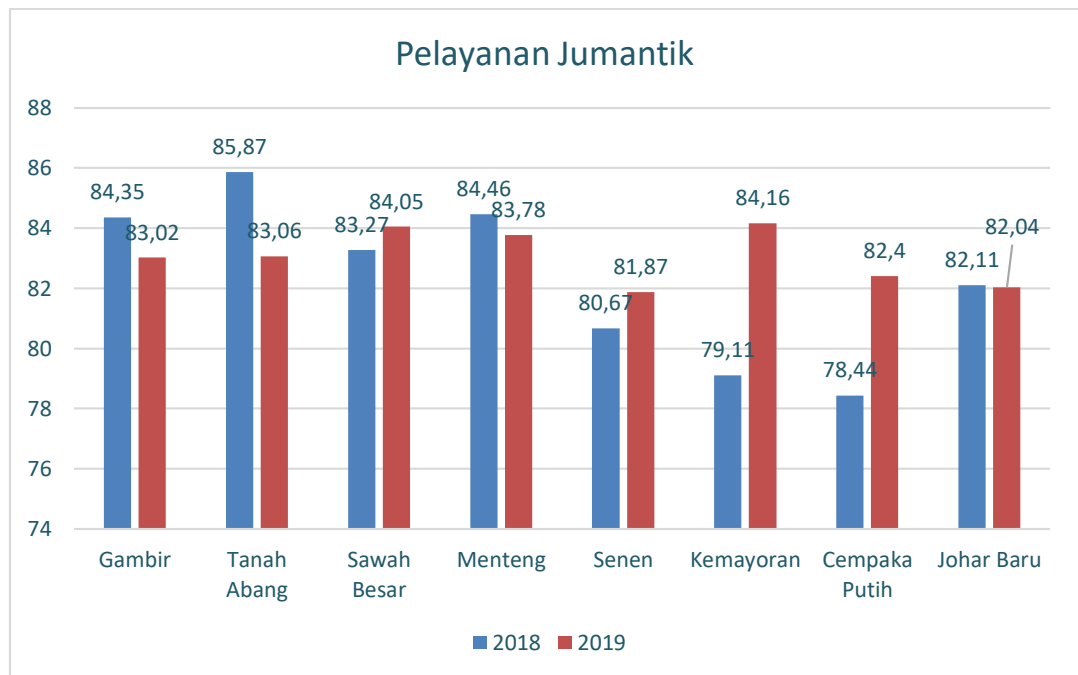
1. Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK)

Berdasarkan hasil survei empat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, kecamatan yang mengalami penurunan nilai tahun 2019 dibanding 2018 antara lain adalah Kecamatan Gambir (-1,33), Tanah Abang (-2,81), Menteng (-0,68), dan Johar Baru (-0,07).

Alasan negatif yang diberikan antara lain:

1. Kader kurang memahami fungsi dan tanggung jawab (kurang pelatihan)
2. Jumlah kader masih kurang

3. Sistem mekanisme dan prosedur
4. Waktu pelayanan
5. Tingkat respon kader terhadap saran dan masukan dalam pemberian pelayanan kurang
6. Kurang pengawasan dari pimpinan untuk peningkatan peran kader
7. Reward kurang
8. Keterbatasan SDM



Laporan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat menunjukkan ada lonjakan cukup tinggi untuk jumlah penderita DBD dan angka kesakitan atau Incidence Rate (IR) pada tahun 2019 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Angka penderita DBD tertinggi di Kecamatan Tanah Abang dan IR tertinggi di Kecamatan Cempaka Putih. Lonjakan tersebut diasumsikan ikut memengaruhi penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan.

TABEL 3.7

DATA PENDERITA DBD BERDASARKAN KECAMATAN
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2018 & 2019

No	KECAMATAN	TAHUN					
		2018			2019		
		PENDERITA DBD	IR	MENINGGAL	PENDERITA DBD	IR	MENINGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GAMBIR	6	6.79	0	34	38.33	0
2	SAWAH BESAR	2	1.76	0	50	43.95	0
3	KEMAYORAN	41	19.95	0	79	38.29	0
4	SEZEN	7	7.38	0	50	52.49	0
5	CEMPAKA PUTIH	18	21.06	0	61	71.04	0
6	JOHAR BARU	14	12.17	0	72	62.36	0
7	MENTENG	17	21.17	0	54	66.97	0
8	TANAH ABANG	13	9.17	0	91	64.02	0
	JAKARTA PUSAT	118	12.76	0	491	52.90	0

Sumber : *Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat*

2. Petugas Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU)

PPSU berperan penting dalam penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai kanal yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama tahun 2019, dalam laporan tahunan Citizen Relation Management (CRM) Kota Administrasi Jakarta Pusat persentase terbesar masalah yang masuk berhubungan dengan sampah dan menjadi ranah PPSU kelurahan terkait.

Dari hasil survey kepuasan masyarakat untuk pelayanan PPSU Kecamatan Tanah Abang memegang nilai tertinggi untuk tahun 2018 dan Kecamatan Menteng memegang nilai tertinggi di tahun 2019. Meskipun begitu, peningkatan nilai paling tinggi dari 2018 ke 2019 dimiliki oleh Kecamatan Kemayoran dengan peningkatan sebesar 4,64 dan Kecamatan Gambir dengan peningkatan sebesar 4,3 point.

Alasan negatif yang diberikan antara lain:

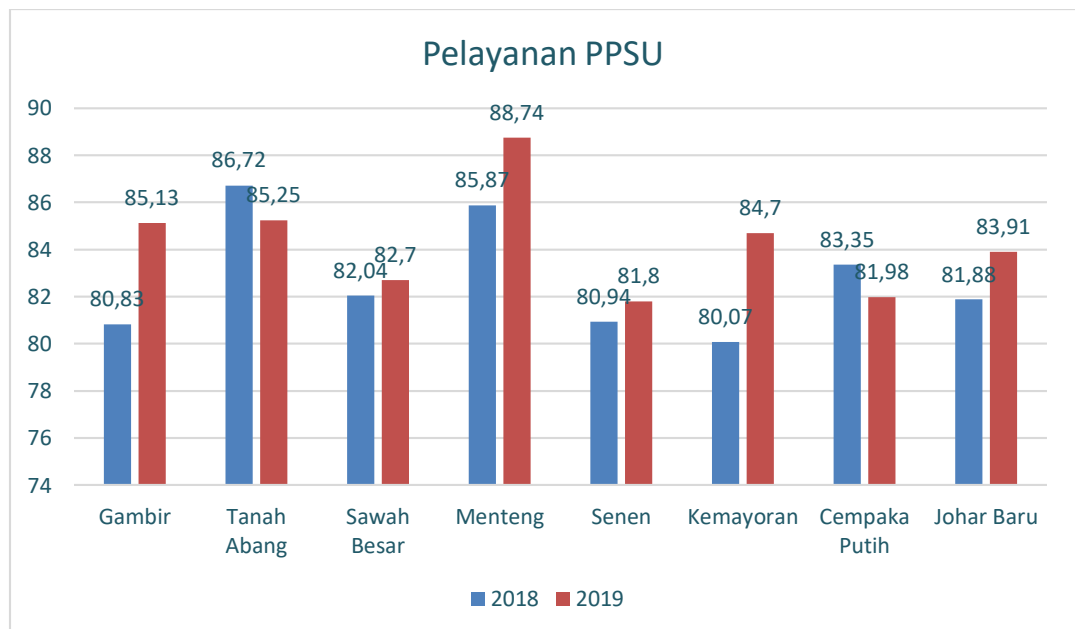
1. Kompetensi
2. Mekanisme

3. Sistem, masyarakat belum memahami bahwa PPSU bekerja sesuai zona dan terjadwal, sementara warga seringkali mengandalkan PPSU untuk segala sesuatu kebutuhan misalnya untuk sampah dan barang-barang pribadi yang tidak terpakai lagi
4. Prosedur
5. Sarana pendukung

Penilaian positif antara lain :

1. Tugas dan fungsi PPSU sudah dijalankan dengan baik
2. Tidak ada pungutan liar
3. Pelaksanaan kegiatan 24 jam, rutin dan terjadwal
4. Penanganan sarana prasarana umum sangat cepat
5. Ada perubahan langsung di lingkungan yang dirasakan warga dengan kehadiran PPSU
6. Persyaratan tidak menyulitkan dan terbuka
7. Petugas memiliki kompetensi di bidang saluran, taman, sampah dan penerangan jalan umum
8. Disiplin, mengenakan pakaian kerja lengkap

Hasil nilai survey PPSU bila dibandingkan per-Kecamatan selama dua tahun hasilnya adalah sebagai berikut :



Apabila peringkat nilai CRM untuk waktu respon dan penyelesaian tercepat selama tahun 2019 disandingkan dengan nilai survey PPSU kecamatan, hasilnya sebagai berikut:

- a. Kecamatan Gambir (85,13)

- b. Kecamatan Sawah Besar (82,7)
- c. Kecamatan Kemayoran (84,7)
- d. Kecamatan Senen (81,8)
- e. Kecamatan Cempaka Putih (81,98)
- f. Kecamatan Menteng (88,74)
- g. Kecamatan Tanah Abang (85,25)
- h. Kecamatan Johar Baru (83,91)

Memperhatikan hasil di atas hasil survey kepuasan masyarakat 2019 terhadap pelayanan PPSU cukup berbanding lurus dengan peringkat CRM tahun 2019 dan hasil survey ini cukup valid. Kecamatan Gambir dengan peningkatan hasil survey tertinggi nomor 2 berada di peringkat 1 untuk CRM dan Kecamatan Kemayoran dengan peningkatan tertinggi hasil survey berada di peringkat ketiga CRM. Demikian pula dengan Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Cempaka Putih yang mengalami penurunan hasil survey, berada di peringkat 4 terbawah menurut hasil CRM.

3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu berperan sangat penting dalam menjaga kesehatan di lingkungan terutama anak-anak dan lansia. Dari hasil survey tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, peningkatan tertinggi kepuasan masyarakat untuk pelayanan Posyandu diraih oleh Kecamatan Kemayoran (+4,73) dan Sawah Besar (+1,5). Sementara Kecamatan Cempaka Putih mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Meskipun begitu, salah satu Posyandu di Kecamatan Cempaka Putih, yaitu Cempaka III menerima penghargaan Pakarti Utama I dalam Lomba Pelaksana Terbaik Posyandu Tingkat Nasional Tahun 2019.

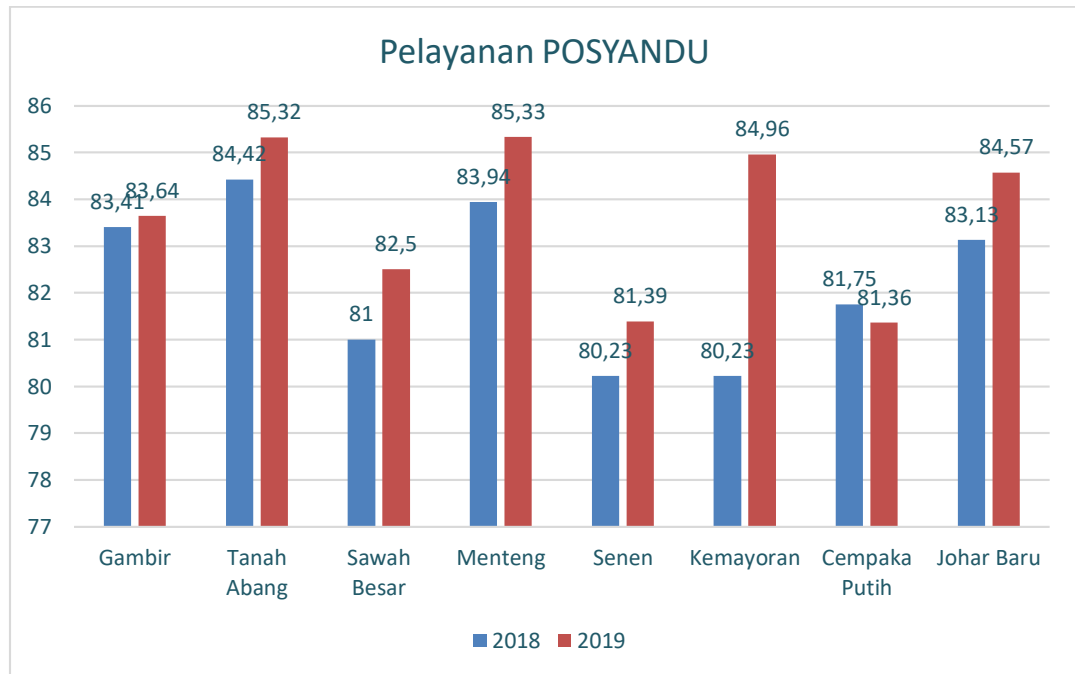
Alasan negatif yang diberikan masyarakat dalam penilaian Posyandu di semua kecamatan, antara lain pelayanan posyandu, diakibatkan banyak warga yang tidak tepat waktu dalam penimbangan anak-anaknya ke Posyandu. Akan tetapi secara garis besar nilai kepuasan masyarakat setiap kecamatan sudah cukup baik.

Alasan penilaian positif antara lain :

1. Penyuluhan yang baik di tingkat Kota sampai kelurahan tentang kesehatan anak di usia balita
2. Pembinaan kader Posyandu berjalan dan kade memahami tugas dan fungsinya
3. Petugas ramah dan sopan, serta responsif menerima masukan
4. Pelayanan gratis

5. Partisipasi warga aktif

Grafik perbandingan nilai per Kecamatan untuk pelayanan Posyandu 2018-2019 adalah sebagai berikut:



4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Prestasi Posyandu Cempaka III pada tahun 2019 tidak lepas dari peran PKK di wilayah tersebut dan bimbingan dari PKK tingkat kota dan sudin terkait. Akan tetapi, bila melihat perbandingan hasil survey, Kecamatan Cempaka Putih mengalami penurunan nilai kepuasan yang bahkan sampai di bawah 80 (79,76). Unsur terendah dari :

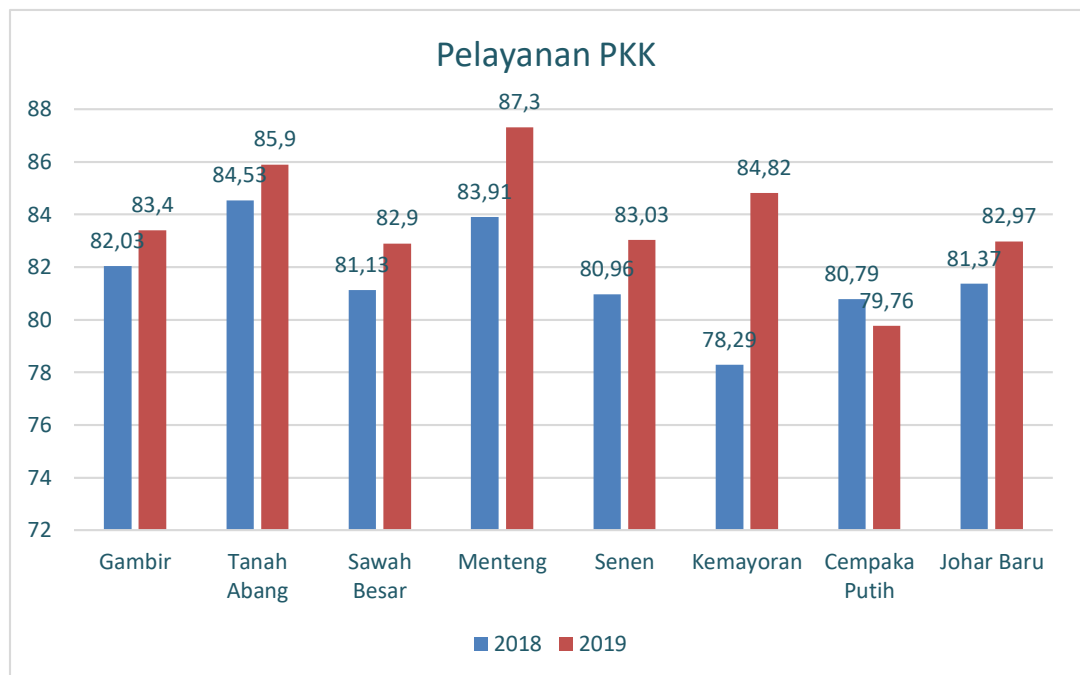
1. Biaya
2. Persyaratan
3. Sistem
4. Kurangnya kepedulian pengurus RT terhadap PKK
5. Honor/ insentif untuk kader PKK
6. Jadwal kegiatan PKK dianggap tidak memahami kesibukan warga binaan
7. Kemampuan kader
8. Kualitas pelayanan kurang karena petugas PKK melaksanakan tugas di sela kesibukan

Penilaian positif antara lain :

1. PKK siap/ piket di kelurahan dan monitor wilayah

2. Respon PP cepat ketika ada masalah di wilayah
3. Rutin pembinaan ke warga
4. Kader memahami tugasnya dan dapat melaksanakan kegiatan dengan baik

Koresponden merasa banyak persyaratan administrasi terkait PKK yang harus dipenuhi dan alur layanan dirasakan tidak memudahkan dan perlunya koordinasi yang lebih intensif dengan pengurus RT.



5. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak/ Taman Maju Bersama (RPTRA/TMB)

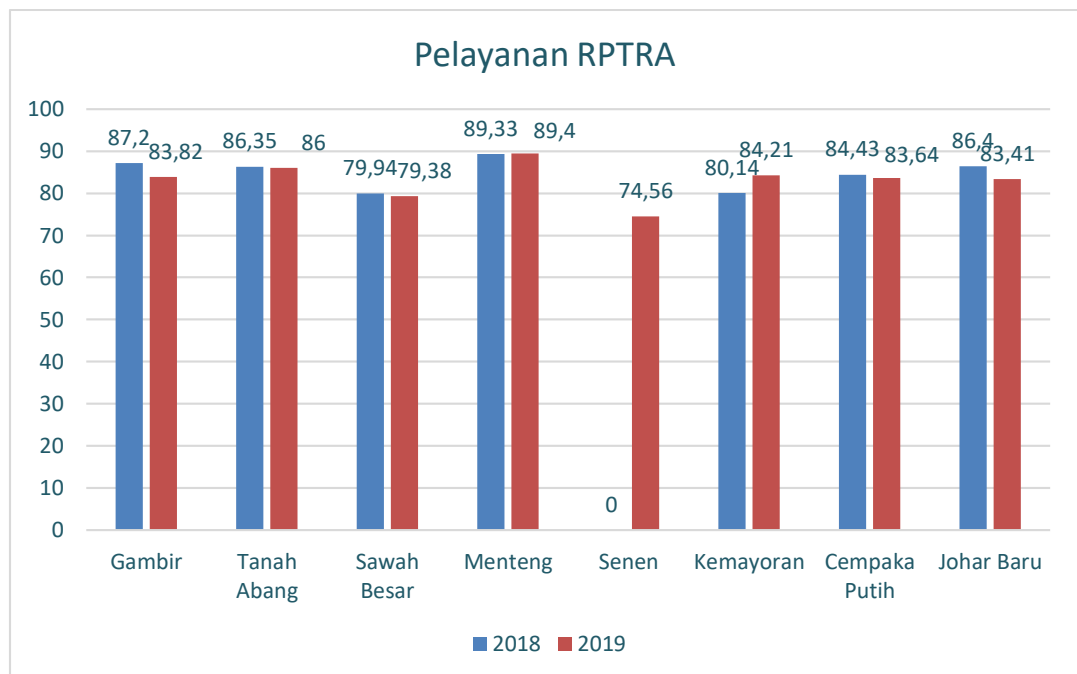
Nilai hasil survey kepuasan pelayanan RPTRA di semua kecamatan rata-rata tidak mengalami fluktuasi tajam. Penurunan yang terjadi juga tidak terlalu signifikan. Akan tetapi penurunan ini terjadi di lima kecamatan dari delapan kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Hal ini patut dievaluasi untuk perkembangan ke depan.

Penilaian positif atas pelayanan RPTRA antara lain:

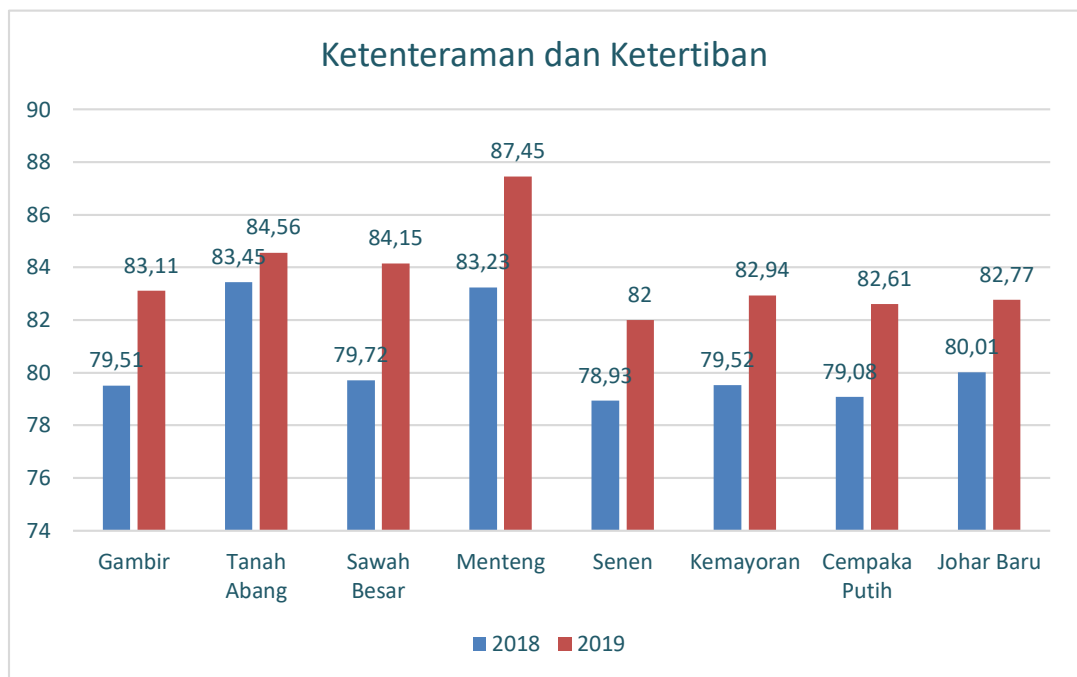
1. Petugas responsif, ramah dan sopan
2. Lokasi RPTRA sudah tetap sehingga warga bisa datang setiap saat
3. Pengelolaan sudah bagus, sarana terjaga dengan baik
4. Biaya gratis
5. Tidak ada syarat menyulitkan dalam hal pemanfaatan fasilitas RPTRA

Penilaian negatif atas pelayanan RPTRA antara lain:

1. Pengelolaan kurang koordinatif
2. Keahlian/keterampilan pengelola RPTRA minim
3. Pengelola RPTRA kurang responsif dalam memberikan pelayanan
4. Pemanfaatan harus mengikuti aturan yang berlaku, bila menggunakan harus koordinasi terlebih dahulu
5. Waktu pelayanan dibatasi tidak sampai larut malam
6. Ada larangan merokok
7. Tidak ada kesekretariatan RPTRA sebagai wadah menampung kegiatan



6. Ketertiban Umum (Tibum)



Pada Tahun 2019 selain pengamanan rutin di semua kecamatan, pengamanan kawasan Tanah Abang, Senen dan Bunderan HI (Menteng) menjadi fokus utama Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selain itu Tahun 2019 Jakarta Pusat juga menjadi sorotan dalam pengamanan Pemilu, demo massa, dan Sidang setelah hasil Pemilu dengan keamanan yang berhasil terjaga dengan baik.

Hasil survei kepuasan masyarakat untuk komponen ketertiban umum bisa dikatakan berbanding lurus dengan usaha yang telah dikerahkan oleh Pemerintah Kota Administrasi bekerja sama dengan Satpol PP. Peningkatan kepuasan tertinggi didapat dari Kecamatan Menteng (+4.22).

Penilaian negatif atas pelayanan Tibum antara lain :

1. Waktu pelayanan ketertiban yang tidak dapat diprediksi masyarakat
2. Kurang cepatnya penyelesaian pengaduan
3. Kurang personil
4. Petugas ketertiban umum perlu pelatihan

Penilaian positif atas pelayanan Tibum antara lain :

1. Selalu memberikan himbauan kepada warga terkait ketertiban umum
2. Perilaku petugas ramah dan berkoordinasi dengan baik
3. Permasalahan terselesaikan dengan baik tanpa kericuhan

Hasil survey untuk enam pelayanan di atas menunjukkan bahwa rata-rata ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat adalah karena :

1. kompetensi petugas dianggap kurang oleh masyarakat. Kompetensi biasanya dinilai dari cara petugas menjelaskan, memberikan informasi, penguasaan atas pekerjaannya, dan sikap sehari-hari dalam menjalankan tugas. Untuk hal ini diperlukan evaluasi lebih jauh untuk menentukan klasifikasi seperti apa yang perlu ditetapkan dalam memilih petugas, serta bimbingan teknis macam apa yang bisa diberikan agar bisa lebih tepat guna;
2. jumlah kader, pelayanan seperti jumantik di mana dalam satu kelurahan memiliki warga dengan tingkat ekonomi yang bervariasi dirasa menyulitkan dalam mencari petugas, selain itu perlu dipikirkan insentif yang dapat menarik warga untuk mau menjadi petugas;
3. sistem, mekanisme, waktu, dan prosedur. Faktor ini berkaitan dengan penentuan standar pelayanan dan kompetensi petugas dalam penguasaan pekerjaan yang dilaksanakannya. Dengan standar pelayanan yang sudah jelas dan mampu disampaikan oleh petugas dengan baik, diharapkan warga bisa mengerti dan menerima bahwa pelayanan yang diberikan seharusnya menguntungkan dan bukan dianggap membebani warga;
4. tingkat respon petugas/kader. Berkaitan dengan pembinaan kompetensi;
5. pengawasan/monitoring pimpinan. Pengawasan dari pimpinan sampai ke tingkat kota adalah hal yang krusial dalam pengembangan berkelanjutan terhadap jenis pelayanan yang diberikan dan kompetensi petugas/kader yang melaksanakan untuk memberikan layanan terbaik bagi warga. Diperlukan evaluasi Rencana Aksi untuk perbaikan ke depan.

Selain poin-poin yang diungkapkan oleh responden pada umumnya, beberapa keluhan seperti persyaratan dan biaya perlu ditelaah lebih lanjut, mengingat keenam pelayanan tersebut adalah layanan non-biaya dan layanan yang tidak memerlukan warga untuk mengikuti persyaratan tertentu seperti layanan administrasi lainnya (pengurusan KTP, KK, dll). Apabila responden belum memahami hal tersebut, maka dua hal tersebut perlu disosialisasikan dan dijelaskan kepada responden sebelum pengisian kuesioner.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

TABEL 3.8
CAPAIAN ANGGARAN PER INDIKATOR

TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN			PROGRAM	ANGGARAN			
		ALOKASI	REALISASI	%		ALOKASI	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dan teknologi informasi	Persentase Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan terhadap Pelayanan dan				Peningkatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Peningkatan Penyelenggaraan	Rp. 3.328.828.862 (a) Rp. 3.200.716.342	Rp. 2.425.778.533	75.79
					Peningkatan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Peningkatan Penyelenggaraan Kecamatan dan Administrasi	Rp. 190.184.405.302 (a) Rp. 181.824.195.950	Rp. 172.219.905.129	94.72
					Peningkatan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pengembangan Kota Administrasi	Rp. 273.300.439.185 (a) Rp. 265.925.175.602	Rp. 249.462.206.087	93.81

Realisasi anggaran program yang telah ditetapkan secara umum cukup berhasil dengan rata-rata penyerapan 89,44%. Perbedaan alokasi anggaran antara di Perjanjian Kinerja dengan di monev terjadi karena efisiensi dan tidak signifikan.

C. PRESTASI

1. **Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2019**, Pemerintah Kota Jakarta Pusat Kategori Madya, Semarang 23 Juli 2019, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
2. **Penghargaan Pemerintah Kota Jakarta Pusat sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2019**, Bandung, 10 Desember 2019, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
3. **Penghargaan Pakarti Utama I Bidang Posyandu Lomba Kesatuan Gerak PKK KB dan Pembangunan Keluarga**, Juli 2019
4. **Juara I, II, dan III Tingkat Provinsi Ajang Kreatif Produktif Generasi Berencana (GenRe)**
5. **2 (dua) Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi**
6. **Juara I Tingkat Nasional Lomba Posyandu**, Banjarbaru, Juli 2019
7. **Juara Umum Tingkat Provinsi Lomba Gebyar RPTRA**, Juli 2019
8. **Juara Harapan I Tingkat Nasional Lomba Posyantek**, Bengkulu 22 September 2019, diwakili Posyantek Johar Baru
9. **Peningkatan jumlah RPTRA sebanyak 50 Lokasi**, terhitung sampai bulan November 2019

babempat

penutup

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tahun 2019, disimpulkan bahwa outcome dari kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2019 dapat tercapai, dalam arti kepuasan masyarakat meningkat dari target dan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi dari hasil persentase capaian, perlu dijadikan catatan, bahwa terjadi penurunan persentase ketercapaiannya.

Perbedaan satuan target di Indikator Kinerja Utama (IKU) dan perjanjian kinerja juga menjadi catatan untuk dokumen Rencana Strategis (Renstra). Hasil Survey cukup tercermin dari pengukuran dengan instrumen lain (CRM dan KSD).

B. SARAN

Untuk mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, diharapkan :

1. Evaluasi Rencana Strategis Kota Administrasi yang sudah ditetapkan, apakah masih sesuai dengan visi misi Gubernur;
2. Perbaikan-perbaikan pelayanan dari segi kompetensi petugas, sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat harus terus dievaluasi dan ditingkatkan;
3. Perekrutan petugas/kader ditingkatkan dengan penilaian kompetensi yang lebih baik;
4. Rencana Aksi dikembangkan mengikuti hasil survey dan evaluasi. Keterlibatan tingkat kota dan kecamatan perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana aksi yang lebih baik;
5. Perbaikan kompetensi petugas survey dalam menyampaikan pertanyaan, mengingat format kuesioner sudah ditentukan dari provinsi (ada pernyataan dan persyaratan);
6. Sosialisasi kepada masyarakat yang menerima pelayanan, bahwa dalam memberikan pelayanan tidak terdapat persyaratan, prosedur serta biaya apapun, sehingga melalui sosialisasi masyarakat mengetahui terkait 3 (tiga) hal tersebut serta dapat membantu penilaian survei oleh masyarakat.



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR 138 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 161 TAHUN 2018 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 161 Tahun 2018 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018-2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan tingkat Provinsi, Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 161 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
6. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
7. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

8. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;
9. Instruksi Gubernur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 161 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2018-2022
- KESATU** : Menetapkan dan mengesahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2022 Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan unit kerja Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk menyusun :
1. Rencana Kerja dan Anggaran;
 2. Penetapan Kinerja;
 3. Laporan Kinerja;
 4. Evaluasi Kinerja.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, Keputusan Walikota Nomor 161 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2018-2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2019

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



BAYU MEGHANTARA
NIP. 197205201991011001


Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
 Nomor : 138 tahun 2019
 Tanggal : 17 September 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2018-2022

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target Kinerja					Definisi Operasional
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tersedianya sarana dan prasarana serta perlengkapannya sesuai standar yang mendukung pelayanan kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat	Indeks	-	3	3	4	4	<p>Kelurahan : Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kegiatan PPSU, Jumantik, Posyandu, PKK, RPTRA, Ketertiban Umum, dll</p> <p>Kecamatan : Agregat Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan</p>

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

 BAYU MEGHANTARA
 NIP 197205201991011001



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANA
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), perlu dibentuk Tim Kerja Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2019

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2019 dengan Susunan Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2019.
- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



BAYU MEGHANTARA

NIP. 197205201991011001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
 Nomor : 24 Tahun 2020
 Tanggal : 28 Januari 2020

SUSUNAN TIM KERJA PELAKSANA
 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2019

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Penanggung jawab : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Pusat
- Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Sekko Administrasi Jakarta Pusat
- Ketua III : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
 Sekko Administrasi Jakarta Pusat
- Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan
 Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
 2. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kota Administrasi Jakarta Pusat
 3. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Pusat
 4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 5. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Sekretariat : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
 Setko Administrasi Jakarta Pusat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



BAYU MEGHANTARA
 NIP 197205201991011001

**KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BIDANG PPSU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2019**

Jenis Kelamin : L P
 Pendidikan Terakhir : SD SMP SMA S1
 Lainnya

Pekerjaan : PNS TNI POLRI SWASTA
 Wirausaha Lainnya

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari Kode angka Sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat saudara tentang pelayanan PPSU a. Sangat Buruk b. Buruk c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
2. Bagaimana pendapat saudara tentang kinerja pelayanan PPSU a. Sangat Buruk b. Buruk c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu PPSU dalam menyelesaikan pekerjaan a. Tidak Cepat b. Kurang Cepat c. Cepat d. Sangat Cepat	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat saudara tentang biaya dalam pelayanan PPSU a. Sangat Mahal b. Mahal c. Murah d. Gratis	1 2 3 4

5. Bagaimana pendapat saudara tentang hasil kinerja pelayanan PPSU a. Sangat Buruk b. Buruk c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
6. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan a. Tidak Kompeten b. Kurang Kompeten c. Kompeten d. Sangat Kompeten	1 2 3 4
7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan a. Tidak Sopan dan Ramah b. Kurang Sopan dan Ramah c. Sopan dan Ramah d. Sangat Sopan dan Ramah	1 2 3 4
8. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana yang digunakan petugas PPSU a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
9. Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan/keluhan pengguna layanan PPSU a. Tidak Ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik dan cepat tanggap	1 2 3 4
Masukan : Saran :	

**KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BIDANG RPTRA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2019**

Jenis Kelamin : L P

Pendidikan Terakhir : SD SMP SMA S1
 Lainnya

Pekerjaan : PNS TNI POLRI SWASTA
 Wirausaha Lainnya

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari Kode angka Sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat saudara tentang pelayanan di RPTRA a. Sangat Buruk b. Buruk c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
2. Bagaimana pendapat saudara tentang kinerja petugas pelayanan di RPTRA a. Sangat Buruk b. Buruk c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu petugas memfasilitasi keinginan pengunjung di RPTRA a. Tidak Cepat b. Kurang Cepat c. Cepat d. Sangat Cepat	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat saudara tentang biaya ketika menggunakan fasilitas RPTRA a. Sangat Mahal b. Mahal c. Murah d. Gratis	1 2 3 4

5. Bagaimana pendapat saudara tentang hasil kinerja pelayanan petugas di RPTRA a. Sangat Buruk b. Buruk c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
6. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas di RPTRA dalam memberikan pelayanan a. Tidak Kompeten b. Kurang Kompeten c. Kompeten d. Sangat Kompeten	1 2 3 4
7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas di RPTRA dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan a. Tidak Sopan dan Ramah b. Kurang Sopan dan Ramah c. Sopan dan Ramah d. Sangat Sopan dan Ramah	1 2 3 4
8. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana yang terdapat di RPTRA a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
9. Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan/keluhan pengguna layanan RPTRA a. Tidak Ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik dan cepat tanggap	1 2 3 4
Masukan : Saran :	

**KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BIDANG POSYANDU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2019**

Jenis Kelamin : L P
 Pendidikan Terakhir : SD SMP SMA S1
 Lainnya

Pekerjaan : PNS TNI POLRI SWASTA
 Wirausaha Lainnya

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari Kode angka Sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat saudara tentang pelayanan POSYANDU a. Sangat Buruk b. Buruk c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
2. Bagaimana pendapat saudara tentang kinerja pelayanan POSYANDU a. Sangat Buruk b. Buruk c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu POSYANDU dalam menyelesaikan pekerjaan a. Tidak Cepat b. Kurang Cepat c. Cepat d. Sangat Cepat	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat saudara tentang biaya dalam pelayanan POSYANDU a. Sangat Mahal b. Mahal c. Murah d. Gratis	1 2 3 4

5. Bagaimana pendapat saudara tentang hasil kinerja pelayanan POSYANDU a. Sangat Buruk b. Buruk c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
6. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan a. Tidak Kompeten b. Kurang Kompeten c. Kompeten d. Sangat Kompeten	1 2 3 4
7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan a. Tidak Sopan dan Ramah b. Kurang Sopan dan Ramah c. Sopan dan Ramah d. Sangat Sopan dan Ramah	1 2 3 4
8. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana yang digunakan petugas POSYANDU a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
9. Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan/keluhan pengguna layanan POSYANDU a. Tidak Ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik dan cepat tanggap	1 2 3 4
Masukan : Saran :	

**KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BIDANG JUMANTIK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2019**

Jenis Kelamin : L P

Pendidikan Terakhir : SD SMP SMA S1
 Lainnya

Pekerjaan : PNS TNI POLRI SWASTA
 Wirausaha Lainnya

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari Kode angka Sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat saudara tentang pelayanan JUMANTIK a. Sangat Buruk b. Buruk c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
2. Bagaimana pendapat saudara tentang kinerja pelayanan petugas JUMANTIK a. Sangat Buruk b. Buruk c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu petugas JUMANTIK dalam menyelesaikan pekerjaan a. Tidak Cepat b. Kurang Cepat c. Cepat d. Sangat Cepat	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat saudara tentang biaya dalam pelayanan JUMANTIK a. Sangat Mahal b. Mahal c. Murah d. Gratis	1 2 3 4

5. Bagaimana pendapat saudara tentang hasil kinerja pelayanan JUMANTIK a. Sangat Buruk b. Buruk c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
6. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan a. Tidak Kompeten b. Kurang Kompeten c. Kompeten d. Sangat Kompeten	1 2 3 4
7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan a. Tidak Sopan dan Ramah b. Kurang Sopan dan Ramah c. Sopan dan Ramah d. Sangat Sopan dan Ramah	1 2 3 4
8. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana yang digunakan petugas JUMANTIK a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
9. Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan/keluhan pengguna layanan JUMANTIK a. Tidak Ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik dan cepat tanggap	1 2 3 4
Masukan : Saran :	

**KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BIDANG PKK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2019**

Jenis Kelamin : L P

Pendidikan Terakhir : SD SMP SMA S1
 Lainnya

Pekerjaan : PNS TNI POLRI SWASTA
 Wirausaha Lainnya

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari Kode angka Sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat saudara tentang pelayanan PKK a. Sangat Buruk b. Buruk c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
2. Bagaimana pendapat saudara tentang kinerja pelayanan PKK a. Sangat Buruk b. Buruk c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu petugas PKK dalam menyelesaikan pekerjaan a. Tidak Cepat b. Kurang Cepat c. Cepat d. Sangat Cepat	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat saudara tentang biaya dalam pelayanan PKK a. Sangat Mahal b. Mahal c. Murah d. Gratis	1 2 3 4

5. Bagaimana pendapat saudara tentang hasil kinerja pelayanan PKK a. Sangat Buruk b. Buruk c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
6. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan a. Tidak Kompeten b. Kurang Kompeten c. Kompeten d. Sangat Kompeten	1 2 3 4
7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan a. Tidak Sopan dan Ramah b. Kurang Sopan dan Ramah c. Sopan dan Ramah d. Sangat Sopan dan Ramah	1 2 3 4
8. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana yang digunakan petugas PKK a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
9. Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan/keluhan pengguna layanan PKK a. Tidak Ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik dan cepat tanggap	1 2 3 4
Masukan : Saran :	

**KUESIONER SURVEI KEPUJAN MASYARAKAT
 BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
 TAHUN 2019**

Jenis Kelamin : L P

Pendidikan Terakhir : SD SMP SMA S1
 Lainnya

Pekerjaan : PNS TNI POLRI SWASTA
 Wirausaha Lainnya

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari Kode angka Sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat saudara tentang pelayanan TRANTIB a. Sangat Buruk b. Buruk c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
2. Bagaimana pendapat saudara tentang kinerja pelayanan petugas TRANTIB a. Sangat Buruk b. Buruk c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu petugas TRANTIB dalam menyelesaikan pekerjaan a. Tidak Cepat b. Kurang Cepat c. Cepat d. Sangat Cepat	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat saudara tentang biaya dalam pelayanan TRANTIB a. Sangat Mahal b. Mahal c. Murah d. Gratis	1 2 3 4

5. Bagaimana pendapat saudara tentang hasil kinerja pelayanan TRANTIB a. Sangat Buruk b. Buruk c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
6. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan a. Tidak Kompeten b. Kurang Kompeten c. Kompeten d. Sangat Kompeten	1 2 3 4
7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan a. Tidak Sopan dan Ramah b. Kurang Sopan dan Ramah c. Sopan dan Ramah d. Sangat Sopan dan Ramah	1 2 3 4
8. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana yang digunakan petugas TRANTIB a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
9. Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan/keluhan pengguna layanan TRANTIB a. Tidak Ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik dan cepat tanggap	1 2 3 4
Masukan : Saran :	